BETTY TIOMINAR

PERKEBUNAN DAN KEMISKINAN

KISAH SEBUAH KAMPUNG DI KAWASAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DTE
Down to Earth
Kampanye Internasional untuk Lingkungan Hidup yang Berkeadilan di Indonesia

PERKEBUNAN DAN KEMISKINAN

KISAH SEBUAH KAMPUNG DI KAWASAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

BETTY TIOMINAR

Perkebunan Dan Kemiskinan
Kisah Sebuah Kampung di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit

Oleh :

Betty Tiominar

Penyunting:

Carolyn Marr

April 2011

DTE
Down to Earth
International Campaign
for Ecological Justice
in Indonesia

Ucapan Terima Kasih

Laporan in bisa terselesaikan dengan bantuan dari banyak pihak. Untuk itu ucapan terima kasih ini ditujukan kepada Riko Kurniawan, Jay Jasmin, masyarakat desa Paya Rumbai, Kepala Desa Paya Rumbai, Sekretaris Desa Paya Rumbai, Bagian Hubungan Masyarakat PT ASL, bagian HRD PT WMI, Yayasan Elang atas bantuan dalam pengumpulan data dan informasi. Terima kasih pula kepada Yoyon untuk memperbaiki beberapa peta, serta Norman Jiwan dan Marcus Colchester atas komentar dan masukan dalam penyusunan laporan ini.

Ucapan terima kasih khusus diberikan kepada Liz Chidley untuk terlibat dalam diskusi awal penyusunan laporan ini, kepada Vera Roger yang telah menulis bagian Eropa – Konsumen BBN, kepada Adriana Sri Adhiati yang membantu perbaikan penulisan bahasa dalam laporan ini, kepada Carolyn Marr yang membantu penyuntingan laporan ini dan tidak lupa kepada Alex yang bersedia untuk mengatur tata letak tulisan ini sehingga menjadi nyaman untuk dibaca.

Terima kasih kepada beberapa lembaga: CAFOD, Caritas Australia, Trocaire, Ford Foundation dan Misereor atas dukungan terhadap kerja-kerja DTE.

"…dulu, masyarakat Paya Rumbai tidak mau kerja di perusahaan perkebunan karena masih banyak pekerjaan lain, seperti kayu yang masih besar-besar dan ikan yang masih banyak. Kini semua itu sudah berkurang, sehingga mau tidak mau masyarakat beralih pekerjaan menjadi pemupuk di perusahaan."

(Seorang warga di Paya Rumbai)

DAFTAR ISI

RINGKASAN v

PENDAHULUAN 1
Bagaimana Laporan ini Dibuat 3

II. KELAPA SAWIT DAN KEMISKINAN: KONTEKS NASIONAL 5
1. Kelapa Sawit di Indonesia 5
2. Penyedia Pasar 7
3. Kelapa sawit untuk BBN 12
4. Kelapa sawit dan kemiskinan 16
5. Kemiskinan di Riau 20

III. PAYA RUMBAI 23
1. Potret Paya Rumbai 23
2. Satu desa, lima perusahaan 24
3. Fasilitas Desa 27
4. Petani dan Nelayan 29
5. Petani Plasma 30
6. Pekerja Kebun Sawit 30

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 35

Catatan Tambahan: Buruh Di Tanah Sendiri 39

Lampiran 1: Perkembangan Pembangunan BBN 43

Lampiran 2: BBN 46

Catatan istilah 49

RINGKASAN

Laporan ini bercerita tentang sebuah desa di era kelapa sawit. Menyajikan garis besar kebijakan daerah dan nasional untuk kelapa sawit dan kemiskinan, menjelaskan dampaknya pada desa Paya Rumbai, Propinsi Riau. Banyak publikasi internasional terkait kelapa sawit, pasar – termasuk bahan bakar nabati (BBN) – dijelaskan secara singkat. Fokus utama laporan ini adalah Indonesia – hulu dari kelapa sawit.

Laporan ini mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan: apa yang terjadi pada masyarakat ketika perkebunan kelapa sawit dibuka di wilayahnya? Apakah kehidupan mereka menjadi lebih baik – karena perusahaan perkebunan dan pemerintah menjanjikan hal itu pada mereka – atau taraf hidup mereka sama saja, atau lebih buruk dari sebelumnya?

Paya Rumbai tidak mewakili semua desa yang terkena dampak kelapa sawit, tetapi dengan menyoroti perkembangan bagaimana kekuatan industri berinteraksi dengan masyarakat desa dalam berbagai cara: betapa sedikitnya pilihan masyarakat saat wilayah mereka menjadi target perkebunan, dan bagaimana pilihan mata pencaharian masyarakat menjadi semakin sedikit ketika ada perkebunan kelapa sawit.

Beberapa hal yang diangkat dalam laporan ini adalah:

- Perluasan perkebunan kelapa sawit bukanlah jawaban atas masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Terbukti, ketika harga minyak sawit tinggi di pasar internasional, masyarakat Indonesia kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng sehigga harga menjadi mahal. Sebaliknya ketika harga minyak sawit jatuh, banyak petani jatuh miskin karena tidak mampu membayar hutang-hutang mereka;
- Belum ada kejelasan kebijakan pemerintah apakah penyediaan bahan bakar nabati itu untuk keperluan energi listrik dalam negeri atau ekspor semata. Padahal pasokan energi dari pemerintah belum memenuhi kebutuhan dasar listrik sebagian besar warga yang tinggal di pedesaan, mengingat mereka masih mengandalkan genset sendiri dan lampu pelita untuk penerangan di malam hari;
- Masyarakat lokal dijadikan petani plasma di tanahnya sendiri dan dieksploitasi oleh manajer perusahaan;
- Penjualan tanah lokal membuat semakin banyak masyarakat desa tidak memiliki tanah sementara yang lain malah menjadi tuan tanah;

- Penduduk lokal dipekerjakan sebagai buruh harian dan menjadi masyarakat kelas dua dengan upah dibawah upah minimum;
- Tekanan atas tanah dan kurangnya lapangan kerja mengharuskan mereka untuk menebang dan menjual kayu dari sisa hutan mereka, meskipun risiko pekerjaan ini adalah kehilangan anggota tubuh bahkan nyawa;
- Pemerintah dan perusahaan belum memberikan perhatian dan pembinaan yang layak bagi para pekerja (baca: buruh) harian di kebun sawit.

Seorang kakak mengangkat adiknya untuk difoto dari jendela rumah

Photo: © DTE

1

PENDAHULUAN

Minyak sawit adalah minyak yang paling banyak diproduksi dan diperdagangkan serta digunakan tidak hanya untuk bahan makanan kemasan, melainkan juga untuk produk bukan makanan – seperti sampo, sabun, kosmetik hingga minyak untuk transportasi dan listrik. Sekitar setengah dari produk kemasan yang dijual di supermarket mengandung minyak sawit. Pada tahun 2008 minyak sawit menduduki peringkat ke-3 dari total 130 juta ton minyak nabati yang diproduksi dari seluruh dunia.[1] Indonesia dan Malaysia adalah produsen terbesar dan Uni Eropa adalah pasar utama minyak sawit, membeli sekitar 3 juta ton per tahun.[2]

Beberapa tahun terakhir konsumsi minyak sawit menjadi berita di Eropa, karena skema perkebunan skala besarnya terkait dengan:

- pelanggaran hak asasi manusia
- hilangnya mata pencaharian masyarakat desa
- kerusakan hutan
- pengambil alihan lahan masyarakat adat
- kepunahan keanekaragaman hayati, termasuk populasi orang hutan dan habit gajah
- dan, terlebih pembukaan perkebunan di lahan gambut yang merupakan tempat penyimpanan karbon, sehingga menyumbang pada perubahan iklim.

Di Eropa dan Indonesia keberadaan 'minyak sawit lestari' masih diperdebatkan apakah mampu mengatasi masalah-masalah tersebut di atas. Industri minyak sawit ingin usaha mereka bertahan dan berkembang, pemerintah Indonesia ingin pendapatan dari ekspor minyak sawit dan pemerintah Eropa sungguh-sungguh menginginkan 'minyak sawit lestari' untuk mengurangi ketergantungan pada minyak fosil dan untuk memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca.

---

1 *WWF Palm Oil Buyers' Scorecard 2009.* http://assets.panda.org/downloads/wwfpalmoilbuyer-scorecard2009.pdf; WWF, Palm Oil, http://www.panda.org/what_we_do/footprint/agriculture/palm_oil/, didapatkan pada April 22, 2010

2 *Antara*, 29 Oktober 2009. 'Perusahaan Eropa Kebanyakan tak Beli Minyak Sawit.' http://www.mail-archive.com/ekonomi-nasional@yahoogroups.com/msg10793.html

Namun demikian, kesempatan untuk mendapatkan 'minyak sawit lestari' yang diidamkan – paling tidak di Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia – sangat tipis. Badan sertifikasi minyak sawit lestari (Kelompok Meja Bundar untuk Minyak sawit Lestari-RSPO) mulai memberikan penghargaan lestari kepada anggota-anggotanya. Ironisnya yang menerima pertama kali adalah perusahaan-perusahaan – seperti PP London Sumatera (Lonsum), PT Musim Mas, dan PT Hindoli, yang masih bermasalah terkait sengketa lahan dengan masyarakat.[3]

Di Indonesia, perkebunan kelapa sawit dianggap oleh pemerintah mampu mengentaskan masalah-masalah kemiskinan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Sektor ini dianggap mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Peraturan terbaru yang mempromosikan BBN – baik untuk kebutuhan energi dalam negeri ataupun untuk ekspor – memberikan pesan positif.

Meski demikian, beberapa laporan yang dibuat oleh organisasi masyarakat sipil menunjukkan kisah yang berbeda dari yang disampaikan oleh pemerintah, kalangan industri perusahaan kelapa sawit, dan para pengambil kebijakan di negara konsumen seperti Inggris yang ingin meyakini bahwa minyak sawit lestari itu ada. Sebagai sebuah organisasi yang mengkhususkan diri bekerja untuk kepentingan anggota-anggotanya, beberapa diantaranya adalah petani kelapa sawit, jaringan kerja Sawit Watch di Indonesia tahu betul apa yang terjadi di lapangan. Pada salah satu laporan mereka menyebutkan bahwa dampak perkebunan kelapa sawit yang dirasakan oleh masyarakat desa dan/atau adat adalah:

- perampasan tanah-tanah adat masyarakat
- kebun petani plasma tidak mendapat perhatian yang sama seperti kebun inti
- penyelesaian sengketa antara masyarakat dan perusahaan meminggirkan hak masyarakat
- tidak ada kejelasan mengenai penentuan harga sawit
- masih banyak petani plasma yang terikat hutang dengan perusahaan
- sarana transportasi jalan yang tidak bagus mempersulit masyarakat untuk menjual langsung buah sawit ke pabrik pengolahan
- penggunaan bahan kimia tanpa menggunakan alat keselamatan yang berpotensi berdampak buruk pada kesehatan petani
- kerusakan hutan akibat pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit[4]

---

3 *Kompas*, 3 Nopember 2009. 'RSPO Jadi Tempat Bersembunyi Perusahaan Bermasalah.' Lihat juga DTE 80-81:17.

4 *Hantu di tanah kami: Petani kelapa sawit di Indonesia dan Kelompok mejabundar dan Konfresi minyak sawit lestari (RSPO),* oleh Forest Peoples Programme dan Sawit Watch, Bogor, Nopember 2006. *Lihat juga* Tanah yang dijanjikan: Kelapa sawit dan Pengambil alihan tanah di Indonesia.- Dampak-nya bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat, oleh Marcus Colchester, Norman Jiwan, Andiko, Martua Sirait, Asep Yunan Firdaus, A. Surambo and Herbert Pane. Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA and ICRAF, Bogor (juga tersedia dalam bahasa Inggris), Nopember 2006.

Laporan DTE ingin menambahkan informasi mengenai kelapa sawit dan dampaknya, berfokus pada satu desa di Propinsi Riau yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas. Tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah laporan ilmiah dan komprehensip tentang hubungan antara kemiskinan dan perkebunan kelapa sawit, namun mempertanyakan bagaimana masyarakat desa berubah dengan kehadiran industri kelapa sawit. Dari sisi masyarakat, didukung dengan beberapa penelitian mengenai pembuatan kebijakan di tingkat lokal dan nasional, laporan ini menyoroti bagaimana dampak perkebunan kelapa sawit di Paya Rumbai. Dari sisi perusahaan, bagaimana masyarakat lokal diberdayakan, apa keuntungan yang diberikan, apa dampak negatif dan bagaimana kondisi pekerja perkebunan.

Kami berharap potret tentang desa yang dikepung oleh perkebunan kelapa sawit ini akan memberikan pemahaman lebih terhadap industri ini dan dampaknya.

Saat ini dalam negosiasi internasional perubahan iklim, beberapa keputusan yang akan diambil berkaitan dengan bagaimana menghentikan emisi gas rumah kaca global, bagaimana menurunkan ketergantungan kita pada energi fosil. Dengan beberapa pilihan yang harus diambil, penting bagi para pengambil kebijakan untuk mempertanyakan keberadaan perkebunan kelapa sawit dan jawabannya harus merupakan bukti-bukti dari lapangan.

Akhirnya, kita tidak dapat mengabaikan dampak dari krisis keuangan global. Pada tahun 2008, kejayaan minyak sawit mendadak berhenti. Situasi ini membawa masalah sendiri, terutama bagi produsen kecil yang telah mengorbankan semua yang mereka miliki demi kebun kelapa sawit dan tidak menyisakan sedikitpun untuk kebutuhan lainnya. Tapi harga minyak sawit kini meningkat lagi.[5] Permintaan untuk komoditi ini akan terus tumbuh jika importir bersikeras bahwa minyak sawit adalah 'produk ramah lingkungan'. Jika pemerintah terus mengabaikan bukti yang ada di depan mata mereka tentang bagaimana pembangunan perkebunan kelapa sawit benar-benar memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan bukan menguranginya.

Bagaimana Laporan ini Dibuat

Down To Earth bekerjasama dengan Yayasan Elang di Riau melakukan kunjungan ke desa pada bulan Nopember 2007 dan Mei 2008. Lama waktu pengumpulan data di lapangan masing-masing adalah tujuh hari di desa. Yayasan Elang sendiri sebenarnya sudah melakukan beberapa kali kegiatan di desa Paya Rumbai sebelum penelitian bersama ini dilakukan.

Pada setiap warga desa yang kami temui, kami menjelaskan bahwa tujuan penelitian kami adalah untuk melihat bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat dan apa yang mereka rasakan dari kehadiran perkebunan kelapa sawit di desa mereka.

Wawancara dilakukan dengan cara informal kepada sekitar 20-an anggota masyarakat. Jumlah orang yang diwawancara tidak bisa dihitung pasti, karena ketika akan mewawancarai satu orang, beberapa saat kemudian wawancara

5 Lihat http://www.mongabay.com/images/commodities/charts/palm_oil.html diakses 23/Apr/2010.

bisa berubah menjadi diskusi kelompok karena sudah bertambah dengan dua atau tiga orang anggota masyarakat yang bergabung.

Tidak semua warga mendapatkan pertanyaan yang sama. Pertanyaan dibuat berdasarkan kelompok warga. Untuk masyarakat yang memiliki lahan plasma (petani kecil yang dilekatkan dengan 'inti'– skema perkebunan besar)[6] pertanyaan yang diajukan adalah:

1) Apakah mereka tahu berapa besar biaya kredit yang harus mereka bayarkan ke perusahaan dalam skema Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dari PT ASL?
2) Berapa hasil yang mereka dapatkan dari kebun plasma?
3) Apakah mereka tahu di mana letak kebun plasmanya?

Untuk mereka yang bekerja di perkebunan kelapa sawit sebagai pemupuk:

1) Berapa upah yang didapatkan?
2) Bagaimana pembagian kerjanya?
3) Apakah pernah mendapatkan pelatihan dari perusahaan mengenai bagaimana cara menggunakan pestisida?

Untuk perusahaan kami menanyakan apakah mereka tahu tentang:

1) RSPO (Kelompok mejabundar untuk minyak sawit lestari)?
2) Apa sumbangan mereka bagi pembangunan masyarakat di desa Paya Rumbai?

Informasi lain yang disajikan dalam tulisan ini merupakan hasil pengamatan langsung atas aktivitas masyarakat seperti bagaimana mereka mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta bagaimana ketergantungan masyarakat akan sumberdaya alam hutan dan sungai.

Selain pengamatan dan wawancara, data sekunder dari berbagai media dan penelitian yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit dan kemiskinan menjadi bahan acuan dalam penulisan laporan ini.

6 Lebih lanjut untuk latar belakang skema ini lihat, sebagai contoh, http://dte.gn.apc.org/63OP1.HTM

II

KELAPA SAWIT DAN KEMISKINAN: KONTEKS NASIONAL

1. Kelapa Sawit di Indonesia

Indonesia saat ini menjadi produsen terbesar minyak sawit, bersama produsen terbesar kedua, Malaysia, menguasai lebih dari 80% pasar dunia.[7]

Peran Indonesia Dalam Produksi Minyak Sawit Dunia Tahun 1993-2008

Uraian		Indonesia	Malaysia	Nigeria	Thailand	Colombia	Lainnya	Dunia
1993	Produksi (000 ton)	3.421	7.403	645	297	324	1.716	13.806
	Persentase (%)	24,8	53,6	4,7	2,2	2,3	12,4	100
2000	Produksi (000 ton)	7.000	10.842	740	525	524	2.196	21.827
	Persentase (%)	32,1	49,7	3,4	2,4	2,4	10,0	100
2007	Produksi (000 ton)	17.373	15.823	835	102	732	289	35.154
	Persentase (%)	44,9	40,9	2,2	2,6	1,9	7,5	100
2008	Produksi (000 ton)	19.200	17.735	860	116	800	3.149	41.860
	Persentase (%)	44,7	41,3	2,0	2,7	1,9	7	100
Pertumbuhan (% thn)		10,4	6,0	1,9	9,5	6,2	4,3	7,9

Sumber: Dirjen Perkebunan 2009[8]

7 http://ditjenbun.deptan.go.id/tahunanbun/tahunan/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=64

8 *Dirjen Pekebunan*, 6 Juli 2009. Pengembangan Kelapa Sawit Nasional, Mewujudkan Visi Indonesia 2020

Perkebunan kelapa sawit menyebar di sebagian besar propinsi di Indonesia. Hingga tahun 2009 luas kebun kelapa sawit mencapai 7,9 juta ha[9] dan terluas adalah di Riau, bagian dari Sumatera dan Kalimantan.

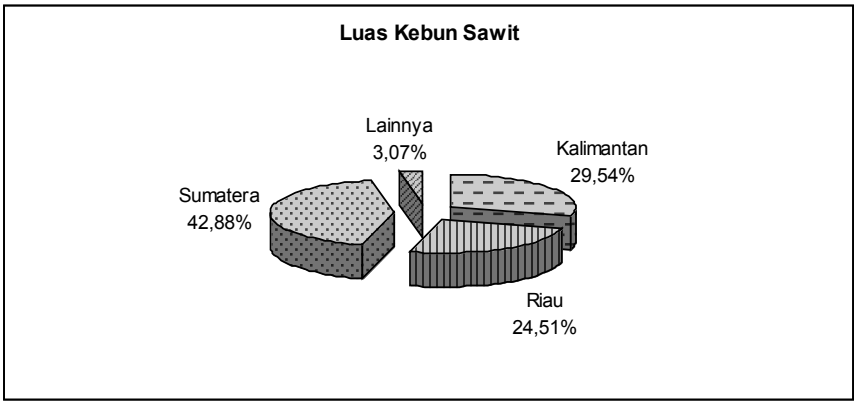

Sumber: Statistik Perkebunan 2008-2010

Lima besar propinsi penghasil minyak sawit Indonesia (2010)

Propinsi	Areal (ha)	Produksi (000 Ton)
Riau	1.911.110	5.764.201
Kalteng	1.114.320	1.217.023
Sumut	1.017.570	2.738.279
Sumsel	690.729	1.753.212
Kalbar	489.062	842.434

Sumber: Statistik Perkebunan 2008-2010

Riau, tempat penelitian ini dilakukan, memiliki luas 86.461,91 km^2 atau 8.646.191 ha,[10] berdasarkan data propinsi Riau 2007. Luas kebun kelapa sawit pada tahun 2005 adalah 1,4 juta ha[11] dan 1.911.110 ha pada 2009.[12] Perluasan kebun akan terus dilakukan. Menurut data Sawit Watch (2010), untuk seluruh Indonesia akan ditambah 26,7 juta ha kebun sawit[13] khusus untuk Riau direncanakan seluas 3 juta ha.[14] Propinsi Papua yang masih memiliki hutan bagus tidak luput dari rencana perluasan kelapa sawit yaitu 5 juta ha di propinsi Papua dan 2 juta ha di Papua Barat.[15]

9 *Kompas*, 4 Januari 2010. 'Serap satu juta pekerja baru.'
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Square_kilometre [1 ha = 0,01 km]
11 2007. Greenpeace. *How The Oil Palm Industry is Cooking the Climate.*
12 http://regionalinvestment.com/newsipid/id/commodityarea.php?ia=14&ic=2
13 Jiwan, Norman. April 2010. *The Indonesia's Land Tenure: myths and facts of the oil palm industry realities*
14 Colchester. M. Et.al 2006. *Promised Land*. FPP and Sawit Watch
15 Amafnini. P. 2 Desember 2009. *Ekspansi Perkebunan Sawit di Tanah Papua.* http://sancapapuana.blogspot.com/2009/12/ekspansi-perkebunan-sawit-di-tanah.html

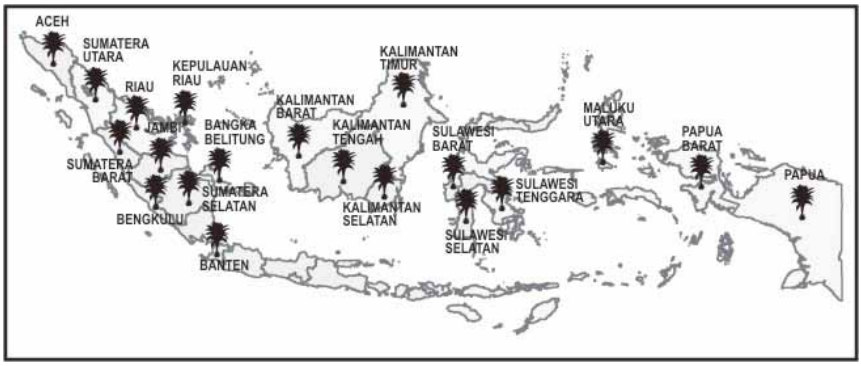

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2006[16]

Selama krisis keuangan di akhir tahun 1990-an, sektor ini mampu bertahan dan berdasarkan beberapa indikator berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi cukup besar.[17]

2. Penyedia Pasar

Perkebunan besar kelapa sawit di Indonesia dimulai sejak tahun 1967. Saat itu luas arealnya baru 105.808 ha dan terus meningkat hingga mencapai 6.338.433 ha pada tahun 2006 menurut data Komisi Minyak Sawit Indonesia (KMSI).[18] Pada tahun 2009 menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencapai 7,9 juta ha[19] dan perkiraan Dirjen Perkebunan mencapai 7.508.023 ha.[20]

Meski terdapat perbedaan angka mengenai luas kebun sawit, namun yang pasti sektor ini diyakini memegang peranan penting dalam perekonomian nasional dan mampu mendorong pengembangan wilayah-wilayah tertinggal serta menyerap tenaga kerja langsung sebesar 3,3 juta kepala keluarga.[21]

Luas areal dan produksi kelapa sawit Indonesia
Tahun 1980-2007

Tahun	Luas Areal (000 ha)			Produksi (000 ton CPO)			Total Areal	Total Produksi
	PR	PBN	PBS	PR	PBN	PBS		
1980	6	200	84	1	499	221	290	721
1990	292	372	463	377	1.247	789	1.127	2.413
2000	1.167	588	2.403	1.906	1.461	3.634	4.158	7.001
2007	2.565	688	3.530	5.805	2.314	9.254	6.783	17.373
Ptb%/th	25,2	4,7	14,6	37,8	5,8	14,8	12,3	12,5

Sumber: BPS, Juli 2008

16 http://www.regionalinvestment.com/sipid/id/commodity.php?ic=2
17 *Bisnis Indonesia*, 4 Juli 2008. 'Industri Sawit di antara dua keinginan.'
18 *Bisnis Indonesia,* 26 Juli 2007. 'Pembatasan lahan langkah mundur & menakuti investor.'
19 *Kompas*, 4 Januari 2010. 'Serap Satu Juta Pekerja Baru.'
20 http://ditjenbun.deptan.go.id/cigraph/index.php/viewstat/komoditiutama/8-Kelapa%20Sawit
21 Op. cit

Menurut Direktorat Jenderal Perkebunan, total realisasi perkebunan dari kawasan hutan dan area penggunaan lain (APL) seluas 4,3 juta ha dan total penerbitan hak guna usaha (HGU) dari kawasan hutan dan APL seluas 4,6 juta ha.[22]

Sementara itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan bahwa ketersediaan lahan untuk komoditas kelapa sawit di seluruh Indonesia adalah 11.487.626 ha. Sementara hasil penelitian SW bersama FPP pada tahun 2006 menyebutkan bahwa rencana perluasan perkebunan kelapa sawit mencapai hampir 20 juta ha,[23] angka terakhir adalah 26,7 juta ha pada 2010.[24]

Ketersediaan lahan komoditas kelapa sawit

No.	Daerah	Luas Lahan (Ha)		Status Tanah
		Digunakan	Tersedia	
1	Bangka Belitung	107.070		
2	Bengkulu	180.693		
3	Irian Jaya Barat	30.171	150.000	Tanah Negara, Ulayat
4	Jambi	274.265	114.000	Masyarakat, Negara Di Olah
5	Jawa Barat	7.115		
6	Kalimantan Barat	373.162	58.720	Masyarakat, Negara
7	Kalimantan Tengah	343.303	497.427	Negara Dan Hak Permohonan
8	Kalimantan Timur	171.581	652.135	Negara, Masyarakat
9	Maluku Utara		100.000	Negara
10	Nad	227.590		
11	Papua	89.827	1.935.000	Negara, Ulayat
12	Riau	1.307.880	30.000	Masyarakat
13	Sulawesi Barat	9.568	45.000	Negara, Masyarakat
14	Sulawesi Selatan	11.894	120.298	Negara, Masyarakat
15	Sulawesi Tenggara		74.000	Negara
16	Sumatera Barat	280.099	14.500	Ulayat
17	Sumatera Selatan	3.500.076	512.740	
18	Sumaterea Utara	229.512	40.000	Negara, Masyarakat
Jumlah		7.143.806	4.343.820	

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2006[25]

Dari table di atas terlihat jelas bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit sudah melebihi lahan yang direncanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal

22 Direktorat Jenderal Perkebunan. 14 August 2008. *Komitmen Pemerintah Membangun Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan*

23 FPP-SW. 2006. *Tanah yang Dijanjikan.*

24 Jiwan, Norman. April 2010. *The Indonesia's Land Tenure: myths and facts of the oil palm industry realities*

25 http://www.regionalinvestment.com/sipid/id/commodity.php?ic=2

(BKPM). Bahkan Direktorat Jenderal perkebunan berharap perluasan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2020 bisa mencapai 9.127.000 ha.[26]

Perkiraan Komposososisi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2020

Posisi tahun 2008			Perkiraan tahun 2020		
Bentuk Pengusahaan	Luas Areal (1000 ha)	Persen-tase (%)	Bentuk Pengusahaan	Luas Areal (1000 ha)	Persen-tase (%)
Perk. Rakyat	2.903	41,42	Perk. Rakyat	4.107	45
Perk. Besar Negara	608	8,67	Perk. Besar Negara	912	10
Perk. Besar Swasta	3.497	48,64	Perk. Besar Swasta	4.107	45
Total	7.008	100	Total	9.126	100

Sumber: Dirjen Perkebunan 2009

Pengambilalihan lahan untuk perluasan perkebunan kelapa sawit ternyata menimbulkan masalah pada sebagian masyarakat, khususnya masyarakat lokal dan adat. Sawit Watch mencatat hingga akhir 2009 terdapat 630 konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit[27] yang belum terselesaikan. Konflik tersebut sebagian besar bermuara dari hak atas tanah masyarakat yang tidak diakui baik oleh pemerintah maupun perusahaan. Masyarakat yang menjadi korban pembangunan perkebunan kelapa sawit merasa ditipu dan dijebak dalam kesepakatan melalui janji-janji palsu.[28] Apa yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia, terjadi juga di di desa Paya Rumbai dan akan dijelaskan lebih rinci pada tulisan ini.

Ekspor vs Kebutuhan dalam negeri

Hingga krisis ekonomi baru-baru ini, tingginya harga minyak sawit di pasar dunia menjadi salah satu pemicu laju perluasan perkebunan kelapa sawit. Sayangnya, kenaikan harga minyak sawit dunia berimbas pada kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri.

Perusahaan-perusahaan besar lebih berorientasi untuk ekspor minyak sawit daripada memenuhi kebutuhan dalam negeri. Akibatnya, terjadi lagi kelangkaan minyak goreng di dalam negeri seperti pada tahun 1999. Ketika itu harga minyak goreng melonjak dari Rp 3.500 menjadi Rp 4.200 - Rp 4.300 per kilogram.[29] Sejak akhir April 2007 harga minyak goreng yang semula berkisar di bawah Rp7.000 per liter meningkat lebih dari Rp10.000, bahkan di Papua harga minyak goreng mencapai Rp40.000 per liter.[30]

26 Dirjen Perkebunan, 6 Juli 2009. *Pengembangan Kelapa Sawit Nasional, Mewujudkan Visi Indonesia 2020*

27 Jiwan, Norman. April 2010. *The Indonesia's Land Tenure: myths and facts of the oil palm industry realities*

28 MARCUS. Colchester. Et. Al. 2006. *Tanah yang di Janjikan.* FPP dan Sawit Watch

29 http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2004/02/23/EB/mbm.20040223.EB89087.id.html

30 *Media Indonesia Online*, 8 Juni 2007. 'Harga Minyak goreng di Papua Capai Rp40 ribu per liter.' http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=134960

Harga CPO per ton di Rotterdam 1999 - 2009

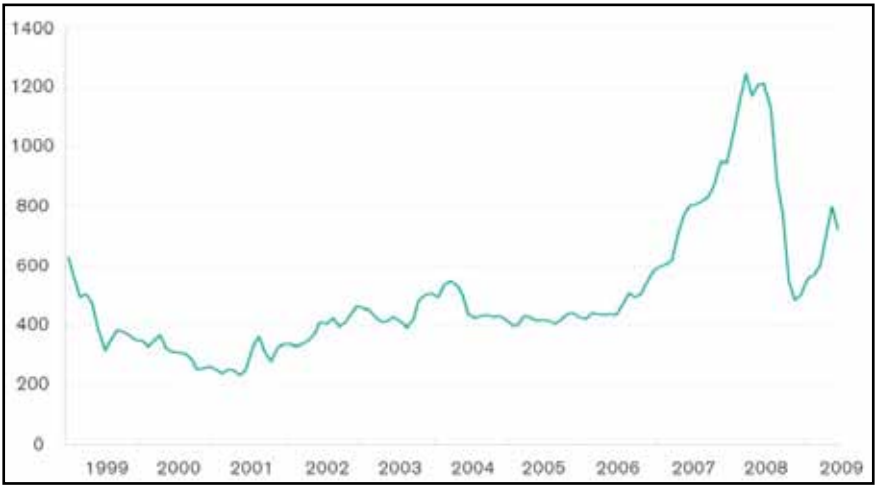

Sumber: http://www.rea.co.uk/prices/

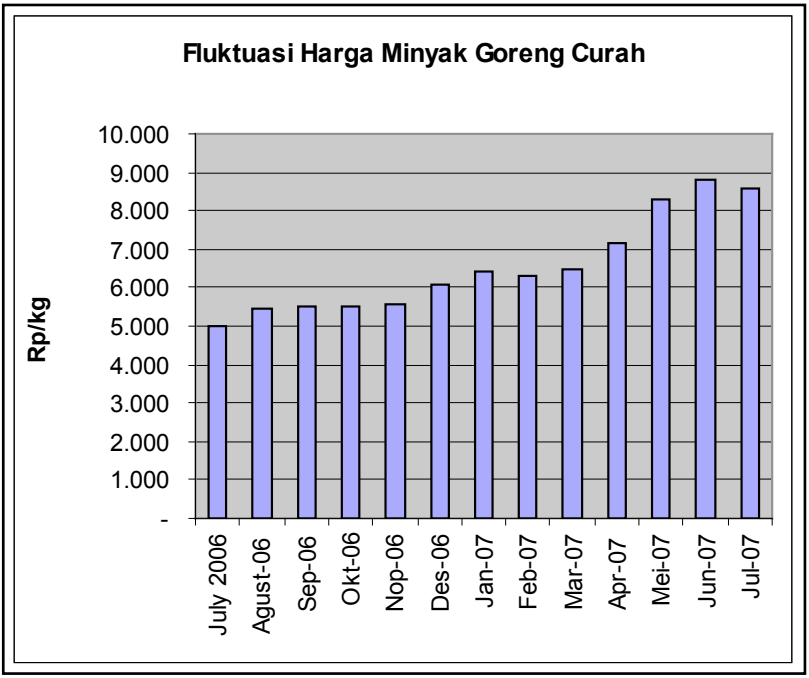

Sumber: Departemen Perdagangan[31]

31 http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/07/11/brk,20070711-103496,id.html

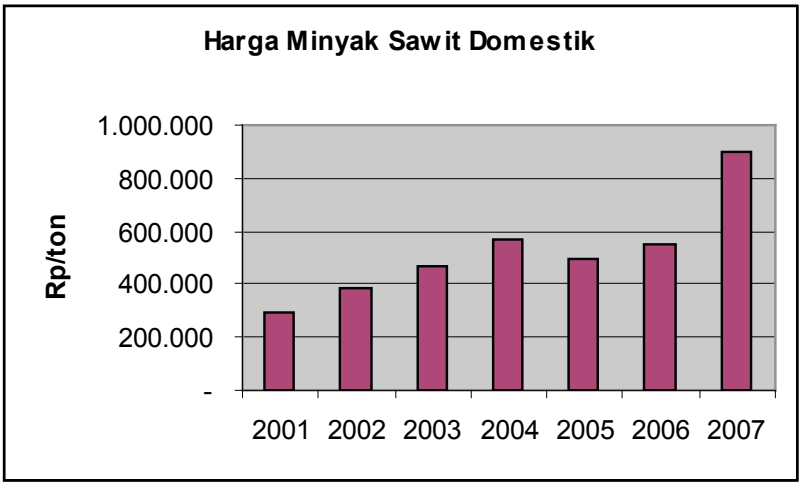

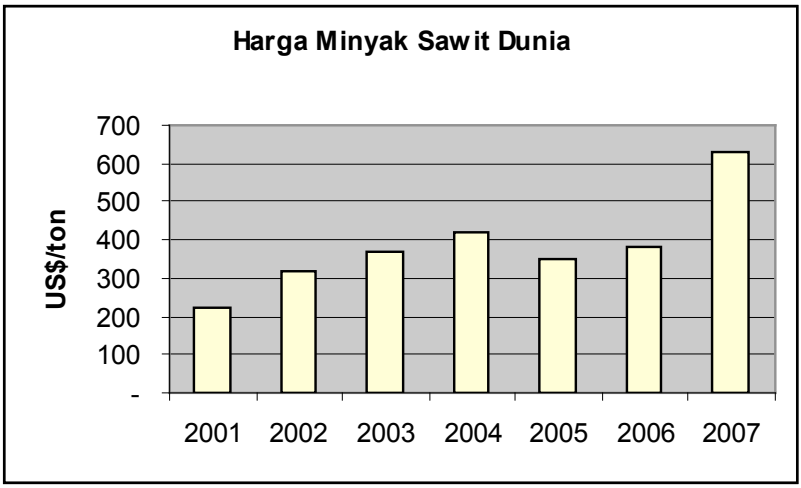

Sumber: Dirjen Perkebunan

Kinerja Ekspor CPO dan Produk Turunannya Asal Indonesia
Menurut Negara Tujuan Ekspor (2004-2009)

Tahun	India		China		Uni Eropa		Negara Lainnya		Total Volume
	Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%	
2004	2,76	31,88	1,08	12,51	1,47	16,97	3,35	38,63	8,66
2005	2,56	24,66	1,35	13,06	1,89	18,24	4,57	44,05	10,38
2006	2,48	20,51	1,76	14,53	2,01	16,64	5,85	48,31	12,10
2007	3,31	27,84	1,44	12,14	1,83	15,38	5,30	44,65	11,88
2008	4,79	33,52	1,77	12,36	2,58	18,07	5,15	36,05	14,29
2009	5,50	32,66	2,65	15,72	3,14	18,63	5,55	32,99	16,83

Keterangan : Volume dalam Juta Ton.
Sumber : Greenomics Indonesia (Mei 2010), berdasarkan data Kementerian Perdagangan[32]

Perkembangan pasokan dan permintaan CPO di Indonesia

Uraian	Volume (juta ton)	
	2006	2007*)
Ekspor	12,1	13,2
Konsumsi	3,3	3,8
Industri turunan	0,5	0,4
Total produksi	15,9	17,4

*) Perkiraan

Sumber: BPS, Departemen Perdagangan, Gapki.[33]

Pada saat harga minyak sawit tinggi, beberapa orang licik mencari keuntungan dari kelangkaan dan mahalnya minyak goreng. Mereka menjual minyak goreng oplosan, yaitu campuran antara minyak jelantah (bekas) dengan bahan kimia tertentu yang membuatnya terlihat jernih, seperti minyak baru. Bahkan ada oplosan yang ditambahkan hidrogen peroksida (H2O2) untuk pemutih (bleaching) atau senyawa benzena yang merupakan zat karsinogenik (penyebab kanker).[34]

3. Kelapa sawit untuk BBN

Tekanan untuk bertindak atas perubahan iklim dan kemungkinan menyurutnya pasokan bahan bakar fosil telah memaksa semua negara untuk mempertimbangkan pilihan energi alternatif yang ramah lingkungan. Akibatnya ada keinginan untuk menjadikan minyak sawit sebagai sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik dan transportasi.

32 *Greenomics Indonesia,* 19 Mei 2010. 'Kinerja Ekspor CPO Indonesia Tak Terganggu Isu Lingkungan'
33 *Bisnis Indonesia*, 1 Mei 2007. 'Produsen CPO Usulkan Subsidi.'
34 http://www.forumsains.com/kesehatan/oplosan-minyak-goreng-curah-dan-oli-bekas/

Eropa – konsumen BBN

Dalam beberapa tahun terakhir ini lonjakan BBN (agrofuel) gencar didukung oleh subsidi pemerintah di seluruh dunia. Salah satu wilayah yang telah mengimpor BBN – termasuk minyak kelapa sawit – adalah Eropa. Pada Desember 2008, Peraturan Uni Eropa tentang Energi Terbarukan (RED) telah diberlakukan dan negara-negara anggota Uni Eropa harus menyusun Rencana Aksi Nasional tentang bagaimana mereka akan menerapkan RED pada Juni 2010.

RED menargetkan 10% dari seluruh energi transportasi harus berasal dari sumber yang terbarukan pada 2020 – dan BBN diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi target ini. BBN untuk pemanas dan listrik juga tercakup dalam target RED umum. Dikatakan bahwa 20% dari seluruh energi yang digunakan di Uni Eropa harus bersumber dari energi terbarukan, termasuk biomassa, bioliquids dan biogas, pada 2020.

Pada Maret 2010 Komisi Uni Eropa menjelaskan bagaimana dalam RED negara-negara anggota dan perusahaan dapat menerapkan kriteria keberlanjutan dan memperhitungkan aturan untuk BBN. Termasuk di dalamnya beberapa standar lingkungan yang agak lemah tetapi sejauh ini tidak ada standar sosial. Komisi Eropa berkewajiban untuk melaporkan sistem penyediaan informasi (mengenai kriteria keberlanjutan) pada akhir 2012 dan dapat menyarankan perbaikan jika perlu.

Secara singkat, kriteria keberlanjutan berarti bahwa penghematan minimum emisi gas rumah kaca dibandingkan bahan bakar fosil harus 35% dari 2009 dan 50% dari 2017. Jika limbah dan residu dari tanaman yang digunakan untuk membuat BBN, mereka dihitung dua kali terhadap target transportasi 10%. BBN bersumber dari lahan yang kaya karbon dan keanekaragaman hayati tidak dapat dihitung sebagai target RED. Namun, ini hanya berlaku untuk tanah yang belum dikonversi untuk penggunaan BBN pada bulan Januari 2008. Dampak dari penggunaan perubahan lahan tidak langsung (ILUC) [35] belum dipertimbangkan di sini.

Komisi Uni Eropa harus mengeluarkan proposal tentang bagaimana menangani ILUC pada akhir 2010. Oleh karena itu, mereka telah memesan empat rangkaian penelitian untuk menguji dampak dari ILUC. Yang pertama, diterbitkan pada bulan Maret 2010, menyebutkan bahwa ILUC telah menunjukkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan produksi pangan serta menekan Komisaris Energi Uni Eropa untuk memikirkan kembali kebijakan BBN di Eropa.[36]

Salah satu negara Eropa yang mengimpor minyak sawit dalam jumlah besar dari Indonesia dan Malaysia setiap tahun adalah Jerman. Jerman mengimpor 1.127.537 ton minyak sawit pada tahun 2008, 47% dari padanya dibakar dalam pembangkit panas dan listrik gabungan (CHP). Investasi dalam CHP adalah bisnis yang menguntungkan karena ada subsidi pemerintah setinggi 0,19 Euro per kWh.[37]

---

35 Perubahan pemanfaatan lahan secara langsung (direct land use change) adalah ketika lahan dibuka untuk tanaman *agrofuel*. ILUC atau perubahan pemanfaatan lahan secara tidak langsung adalah dampak tak langsung ketika lahan dibuka untuk bercocok tanam, yang kemudian 'digusur' untuk tanaman *agrofuel*.

36 http://euobserver.com/19/29840

37 http://www.regenwald.org/regenwaldreport.php?artid=304. Informasi terkini mengenai penggunaan minyak sawit di Inggris dapat dilihat di newsletter DTE no. 84 http://dte.gn.apc.org/84dpa.htm

Untuk memberikan contoh lain tentang arus minyak sawit dari Indonesia, pada tahun 2008 hampir 1,8 juta ton BBN diimpor hanya untuk sektor transportasi Eropa. Sementara 80% dari impor pada waktu itu berasal dari AS, jumlah ini diperkirakan menurun tajam dalam beberapa tahun mendatang karena adanya hukum anti-dumping Uni Eropa yang berlaku mulai Maret 2009. Berdasarkan asumsi yang dibuat oleh Institut kebijakan pangan internasional (International Food Policy Research Institute), penurunan impor BBN dari Amerika Serikat akan digantikan oleh minyak sawit dari Indonesia dan Malaysia. Diperkirakan impor minyak sawit dari negara-negara tersebut akan meningkat empat kali lipat pada tahun 2020.[38]

Kelompok-kelompok lingkungan di Eropa sedang melobi Uni Eropa mengenai kriteria keberlanjutan RED dan terutama ILUC tahun ini.[39] Mereka telah mendirikan koalisi Biofuels Eropa yang dikoordinasikan oleh Friends of the Earth Eropa dan lain-lain. Kerja berkoalisi telah meningkat tahun ini mengingat Rencana Aksi Nasional sedang dikembangkan oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Banyak lobi dan kampanye juga dilakukan di tingkat nasional. Salah satu kelompok yang paling aktif di tingkat kampanye adalah Biofuelwatch di Inggris.[40]

BBN di Indonesia

Pengembangan energi nabati merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Rencana ini dikukuhkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 10 tahun 2006 tentang pembentukan Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran.

Dalam Indonesia Green Energy Action Plan[41] atau rencana Indonesia untuk energi yang berbahan baku nabati ada tiga aspek penting yang diyakini dapat mendorong perekonomian nasional, yaitu:

- Pro Jobs untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas
- Pro Growth yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan
- Pro Poor yang akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Dari kesemua program tersebut pemerintah Indonesia berharap pada tahun 2010 bisa:[42]

1. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi 3,5 juta orang
2. Meningkatkan pendapatan petani minimal menyamai UMR (upah minimum regional)[43]

38 http://www.ifpri.org/publication/global-trade-and-environmental-impact-study-eu-biofuels-mandate
39 http://www.wetlands.org/LinkClick.aspx?fileticket=IPScUuJ2K4E%3d&tabid=56
40 www.biofuelwatch.org.uk
41 SUGIYONO. Agus. 2008. *Pengembangan Bahan Bakar Nabati untuk Mengurangi Dampak Pemanasan Global.*
42 *INILAH.COM*. 2 Maret 2009. 'SBY. Biofuel Bermanfaat Ganda Bagi RI.'
43 Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha.

3. Mengembangkan tananaman bahan biofuel di 5,5 juta hektare tanah
4. Terbentuknya 1000 desa mandiri dan 12 daerah khusus biofuel
5. Mengurangi ketergantungan akan minyak fosil paling tidak 10%
6. Menghemat devisa sampai dengan US$ 10 milyar[44]
7. Memenuhi kebutuhan biofuel dalam negeri dan ekspor

Selain target tersebut di atas, pemerintah juga berharap pada tahun 2025 penggunaan energi alternatif mencapai minimum 17%.[45]

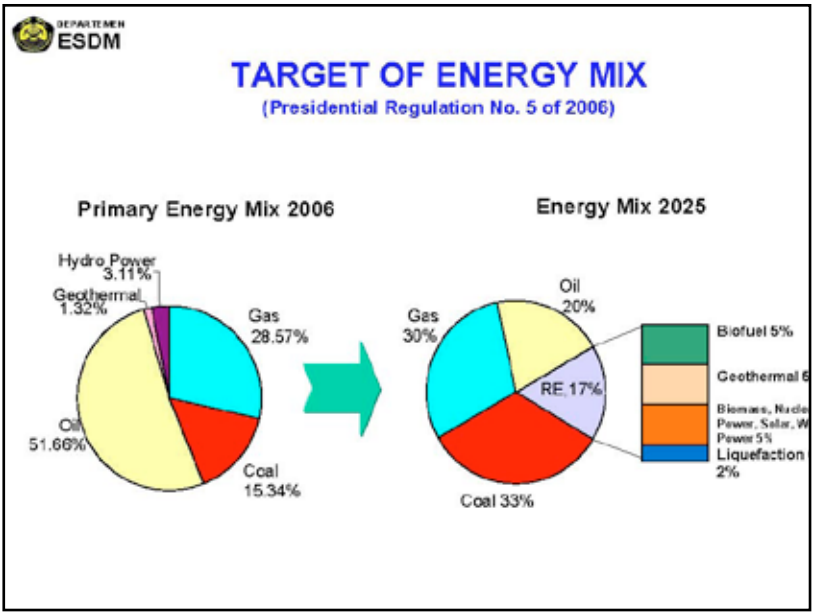

Pada pertengahan 2008, sekitar 17 perusahaan BBN juga menghentikan produksi akibat tingginya harga bahan baku dan ketidakjelasan regulasi atas proyek BBN sebagai energi alternatif.[46] Kini dari 22 produsen BBN yang ada, hanya lima perusahaan yang masih bertahan, yaitu PT Indo Biofuels, PT Eterindo Wahanatama Tbk, PT Multikimia Intipelangi, Wilmar Nabati, dan PT Darmex Biofuels.[47] Harga bahan baku yang tinggi serta rendahnya penyerapan BBN lokal menjadi alasan ketidakmampuan pencapaian target pemanfaatan BBN. (Untuk informasi selanjutnya lihat Lampiran 1: Peta jalan BBN, dan Lampiran 2: Produksi BBN)

44 Tidak ada informasi bagaimana penghematan akan dilakukan
45 *INILAH.COM*. 18 Nopember 2008. 'Kadin Tagih Insentif Industri Biofuel.'
46 *INILAH.COM*. 12 Mei 2009. 'Pengusaha Biofuel Rugi US$ 2 M'
47 *Investor Daily*. 28 Februari 2011. 'Saatnya serius Garap BBN'

4. Kelapa sawit dan kemiskinan

Resminya, perkebunan kelapa sawit dianggap mampu untuk menyerap cukup banyak tenaga kerja, khususnya di pedesaan. Untuk tiap pengembangan 5 juta ha kelapa sawit memberikan kesempatan kerja kepada 2 juta orang (0,4 orang/ha x 5 jt ha).[48] Menurut Dirjen Perkebunan, daya serap sektor ini adalah 338.000 orang/ tahun.[49]

Ketika Indonesia dilanda krisis 1997, komoditi ini tidak mengalami gejolak. Bahkan berkontribusi kepada (beberapa indikator) pertumbuhan ekonomi cukup besar. Nilai ekspor sebelum krisis (1992-1996) tercatat US$646 juta, sedangkan selama krisis (1997-2001) menjadi US$1,07 juta.[50]

Sumbangan industri CPO dalam pertumbuhan ekonomi

Indikator ekonomi	Rata-rata	
	Sebelum krisis (1992-1996)	Selama krisis (1997-2001)
Areal (juta ha)	1,832	3,051
Produksi (juta ton)	4,015	5,966
Volume ekspor (juta ton)	1,781	2,700
Nilai ekspor (US$juta)	646	1.074
Konsumsi domestik (juta ton)	2,043	3,051

Sumber: Litbang Pertanian, Deptan.

Tahun 2008, ekspor CPO mencapai 14,3 juta ton dengan nilai US$ 12,4 milyar. Negara juga memperoleh pendapatan dari PE (Pungutan Ekspor) CPO, tahun 2008 sebesar Rp 13,5 trilyun. Memberikan lapangan kerja sekitar 3,5 juta Kepala Keluarga (KK) mulai dari petani kebun sampai staff lainnya.[51]

Tulisan ini bertolak belakang dengan pandangan pemerintah dan industri kebun sawit, yang menganggap kelapa sawit mampu memberikan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan. Laporan ini ingin menunjukkan realitas lapangan yang berbeda.

48 Pahan. Iyung. 2006. *Panduan Lengkap Kelapa Sawit. Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir.* Jakarta.
49 Barani. Ir. Achmad Mangga. 6 Juni 2007. *Pembangunan Perkebunan Masa Depan. Makasar.*
50 *Bisnis Indonesia,* 4 Juli 2008. 'Industri sawit di antara dua keinginan.'
51 Ibid.

Ukuran Kemiskinan

Pada tahun 2008 jumlah penduduk Indonesia tercatat mencapai 228.249 juta orang.[52] Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia Maret 2009 adalah 32,53 juta jiwa dan sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah pedesaan.[53]

Dari 70.000 desa yang ada di Indonesia, sekitar 45% dikategorikan sebagai desa tertinggal karena kondisi infrastrukturnya minim.[54]

Diperkirakan sebanyak 100 juta penduduk Indonesia secara langsung menggantungkan hidup mereka pada hutan serta hasil dan jasa hutan.[55]

Menurut penelitian CIFOR, 20% dari masyarakat desa hidup bergantung pada hutan dan miskin.[56]

Bertolak belakang dari pernyataan pemerintah dan perusahaan, laporan Bank Dunia tahun 2006 menyebutkan bahwa masyarakat miskin sebagian besar bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan.[57]

Program penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1960-an selama pemerintahan Soekarno. Dibawah pemerintahan Soeharto program ini dilanjutkan dalam rencana pembangunan lima tahun (Pelita) secara sektoral dan regional. Baru pada Pelita V dikoordinasikan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan yang akhirnya diwujudkan melalui program IDT (Inpres Desa Tertinggal).[58]

Setidaknya, ada 25 program penanggulangan kemiskinan yang diperkenalkan pada dekade itu dan sebagian diteruskan melalui pembangunan daerah yang diidentifikasi 'tertinggal' dengan menggunakan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) pada akhir 1990-an – yaitu selama krisis keuangan yang terakhir sebelum krisis tahun lalu – untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan.[59] Sayangnya hingga tahun 2008 tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan tidak banyak berubah (lihat grafik). Dengan kata lain tingkat kemiskinan di daerah perdesaan masih lebih parah daripada di daerah perkotaan (lihat tabel).

52 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIAEXTN/0,,menuPK:287097~pagePK:141132~piPK:141109~theSitePK:226309,00.html

53 Berita Resmi Statistik. No. 43/07/Th. XII, 1 Juli 2009. *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2009.* http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan-01jul09.pdf

54 Tim Nasional Pengembangan BBN. *BBN. Bahan Bakar Alternatif Tumbuh Sebagai Pengganti Minyak Bumi dan Gas.*

55 Chidley. L. 2002. *Forests, people and Rights.* Down To Earth.

56 http://www.cifor.cgiar.org/pen/pubs/barcelona/8jan08/RIRIN_Indonesia.ppt#258,3,Introduction

57 The World Bank. 2006. *Making The New Indonesia Work For The Poor.*

58 http://tkpkri.org/id/sejarah-singkat-tim-koordinasi-penanggulangan-kemiskinan.html

59 Hasil penelitian DTE untuk program-program kemiskinan. Tabel dapat diperoleh di DTE.

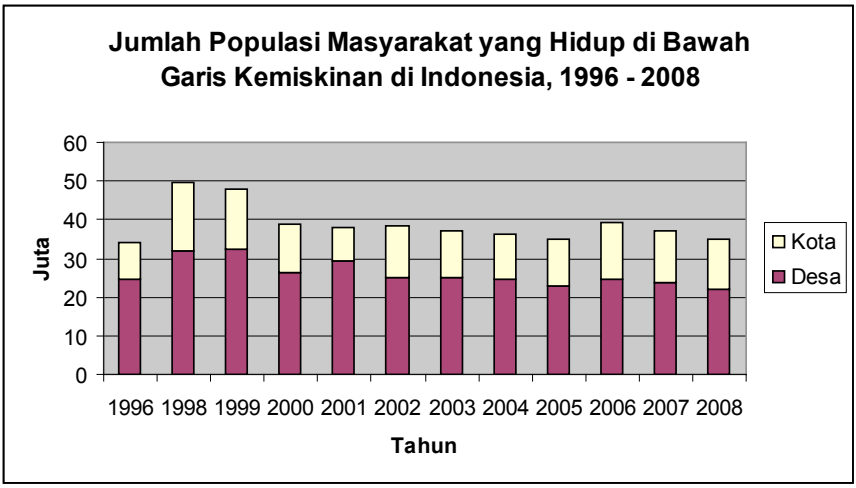

Sumber: Survey Sosial Ekonomi Nasional[60]

Tabel: Tingkat kemiskinan di Kota dan Desa di Indonesia, 2009[61]

	Desa	Kota
Jumlah penduduk miskin (juta jiwa)	20,62	11,91
Garis kemiskinan makanan (Rp/kapita/bulan)	139.331	155.909
Garis kemiskinan bukan makanan (Rp/kapita/bulan)	40.503	66.214
Indeks kedalaman kemiskinan	3,05	1,91
Indeks keparahan kemiskinan	0,82	0,52

Catatan: GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari; sedangkan GKBM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

60 http://dds.bps.go.id/eng/brs_file/eng-kemiskinan-01jul09.pdf

61 Links from http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIAEXTN/0,,contentMDK:20100026~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:226309,00.html

Tabel: Kemiskinan di Indonesia menurut Bank Dunia,[62] UNDP[63] dan BPS

Bank Dunia	Harapan Hidup saat lahir; total (tahun) pada tahun 2007: 71	Angka kematian, bayi (per 1.000 kelahiran hidup) di 2007 : 25	Tingkat melek huruf, perempuan muda (% usia 15-24) tahun 2006: 96,3	PDB (US$ saat ini) (juta) pada tahun 2008: 496.128	PDB per kapita, metode Atlas (US$ saat ini) pada tahun 2008: 2,010
Indeks Pembangunan Manusia, 2007*	Nilai IPM: 0.734	Harapan hidup saat kelahiran (tahun): 70,5	Tingkat melek huruf orang dewasa (% Usia 15 dan ke atas): 92,0	Gabung-an rasio pendaftar-an kotor (%): 68,2	PDB per kapita (PPP US $): 3.712
BPS 2009	Jumlah masyarakat miskin (juta jiwa): 32,53	Garis Kemiskinan makanan (Rp/kapita/bulan): 147.339	Garis Kemiskinan bukan makanan (Rp/kapita/bulan): 52.923	Indeks kedalaman kemiskinan: 2,50	Indeks keparahan kemiskinan: 0,68

Angka-angka ini menunjukkan bahwa kemiskinan pedesaan tetap berlangsung meskipun perluasan kebun kelapa sawit terjadi besar-besaran dan dipromosikan sebagai jawaban terhadap kemiskinan.

Bukti lain menunjukkan, terdapat hubungan erat antara fluktuasi harga di pasar internasional dengan minyak kelapa sawit dan kemiskinan. Ketika terjadi krisis keuangan pada 2008, sektor minyak sawit ikut menderita. Harga di pasar internasional jatuh dan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani turun hingga mencapai Rp250 per kilogram[64] dari sekitar harga Rp1.500 – Rp 2.000 per kilogram.[65] Di Riau, tercatat 104 ribu keluarga petani plasma dan 174.978 keluarga petani non plasma kesulitan membayar kredit perkebunan ke sejumlah bank yang keseluruhan jumlahnya mencapai Rp 1,2 trilun.[66]

Situasi ini berbeda dengan krisis keuangan 1998. Saat itu sektor ini justru menjadi primadona karena terjadi kenaikan harga komoditas di pasar internasional. Krisis 2008 membuat kebanyakan petani sawit stress menghadapi anjloknya harga sehingga beberapa diantara mereka menjadi gila bahkan bunuh diri karena tidak mampu membayar hutang.[67] Hutang-hutang tersebut selain untuk membayar kredit kepemilikan kebun juga untuk kepemilikan alat transportasi, seperti motor dan mobil atau perlengkapan rumah tangga (kulkas, TV, mesin cuci dll) yang biasanya mampu mereka lunasi setiap panen sawit tiba.

62 Lihat tautan dengan Worldbank di atas
63 http://hdrstats.undp.org/en/countries/country_fact_sheets/cty_fs_IDN.html
64 *Detik News,* 15 Oktober 2008. 'Harga Sawit Anjlok Hingga Rp 350 per Kilogram.'
65 *Detik Finance,* 15 Oktober 2008. 'Harga Sawit Anjlok, Petani Terbelit Hutang.'
66 *Tempo Interaktif,* 13 Nopember 2008. 'Harga Sawit Anjlok, Petani Riau Terjerat Kredit'
67 *Suara Karya Online,* 5 Nopember 2008. 'Era Orang Kaya Baru (OKB) Tinggal Kenangan'.

5. Kemiskinan di Riau

Tidak beda dengan pemerintah pusat, pemerintah propinsi Riau pun menganggap bahwa sawit sebagai salah satu jalan keluar untuk mengentaskan kemiskinan. Di propinsi Riau untuk mengurangi masyarakat miskin yang berjumlah 566,7 ribu jiwa (10,63%) - yang sebagian besar (56,75%) berada di pedesaan[68] - pemerintah Riau meluncurkan program K2I, yaitu program pengentasan masyarakat Riau dari belenggu Kemiskinan, Kebodohan dan keterbatasan Infrastruktur.[69] Program ini dimulai tahun 2002, dan ditetapkan kembali menjadi program kerja untuk periode kepemimpinan Gubernur H. M. Rusli Zainal tahun 2004 – 2008.[70]

Komoditi unggulan dalam program ini adalah sapi dan kelapa sawit. Program kebun K2I untuk masyarakat miskin yang direncanakan seluas 50 ribu hektare, ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2006 tentang Proyek bersifat tahun jamak atau multiyears[71] dan dikerjakan selama lima tahun hingga tahun 2010.[72] Lahan yang sudah ditetapkan untuk proyek ini adalah seluas 10.200 ha dan konsep programnya adalah kredit tanpa bunga dengan harapan masyarakat mampu membayar hutang mulai tahun 2010. Adapun rencana anggaran untuk proyek ini adalah sebesar Rp217 milyar yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau dengan pembagian untuk tahun 2006 dianggarkan sekitar Rp45 milyar lebih kemudian tahun 2007 dianggarkan lagi Rp73 milyar.[73]

Sebagai tahap awal akan dibuka kebun sawit di empat kabupaten yaitu Bengkalis, Kuansing, Indragiri Hulu dan Kampar[74] dan alokasi anggaran tahun 2006 digunakan untuk pemantapan lahan sekaligus untuk pembukaan lahan (land clearing), pembibitan dan penanaman.[75] Setelah tahap awal seluas 4.800 ha selesai baru akan dilanjutkan ke Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir dan Indragiri Hulu.

Sejak awal proyek pengentasan kemiskinan melalui pembukaan kebun sawit mendapat penolakan dari ornop-ornop di Riau dengan beberapa alasan, yaitu ketidakjelasan target keluarga miskin yang dituju serta penetapan lokasi kebun yang terpisah-pisah yang berpotensi menyulitkan pengontrolan kebun.[76]

Ternyata hingga tahun 2010, proyek kebun sawit ini baru terealisasi 20% atau sekitar 2.000an ha dari rencana seluas 10.200 hektare dan belum satu pun kelapa sawit yang mencapai usia tiga sampai empat tahun.[77] Ada dua kendala dalam program ini yaitu ketidakjelasan calon penerima kebun oleh Dinas Perkebunan (Disbun) Riau – sama seperti yang dikhawatirkan oleh para ornop Riau – dan ketidakjelasan lahan untuk proyek kebun sawit.[78]

---

68 BPS. http://bpsriau.homeip.net/attachments/BRS-01072008-kemiskinan.pdf
69 http://www.riaumenuntut.com/download/Minda%20-%20Riau%20Dalam%20Refleksi%202004.doc.
70 Ibid.
71 *Rapor Dinas Perkebunan Merah*. http://groups.yahoo.com/group/lingkungan/message/31859; *Riau Terkini,* 18 Januari 2006. Kebun K2i Dijadikan Proyek Multiyears
72 *Riau Terkini*, 18 Januari 2006. 'Kebun K2i Dijadikan Proyek Multiyears'
73 Ibid
74 *Riau Online*, 13 Nopember 2007. 'Kebun Sawit K2I Akan Segera Dibangun di 4 Kabupaten'
75 *Riau Post*, 21 April 2006. 'Kebun Sawit K2I Tinggal Pelaksanaan'
76 *Riau Terkini,* 1 Juni 2006. 'NGOs dan DPRD Ramai-Ramai Tolak K2I Kebun Sawit'
77 *Riau News*, 10 Maret 2010. 'Jefri: Kebun K2I Program Gagal'
78 *Riau Times*, 27 Januari 2010. 'Lahan Kebun K2I Belum Jelas'

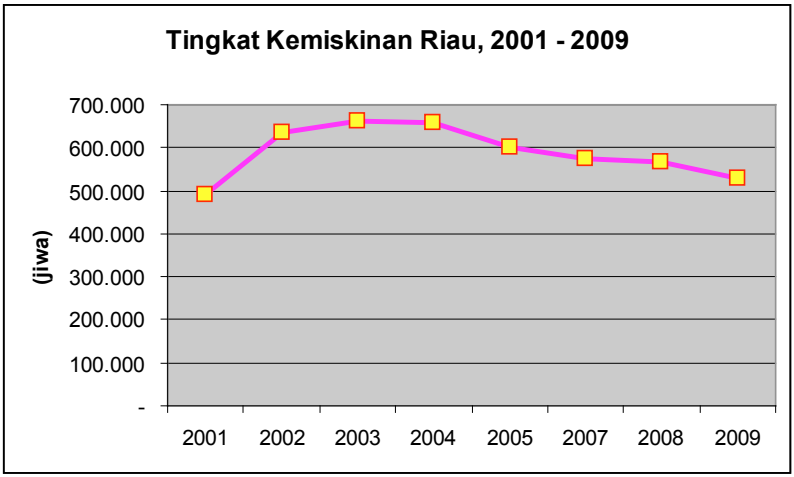

Sumber: Biro Pusat Statistik Riau

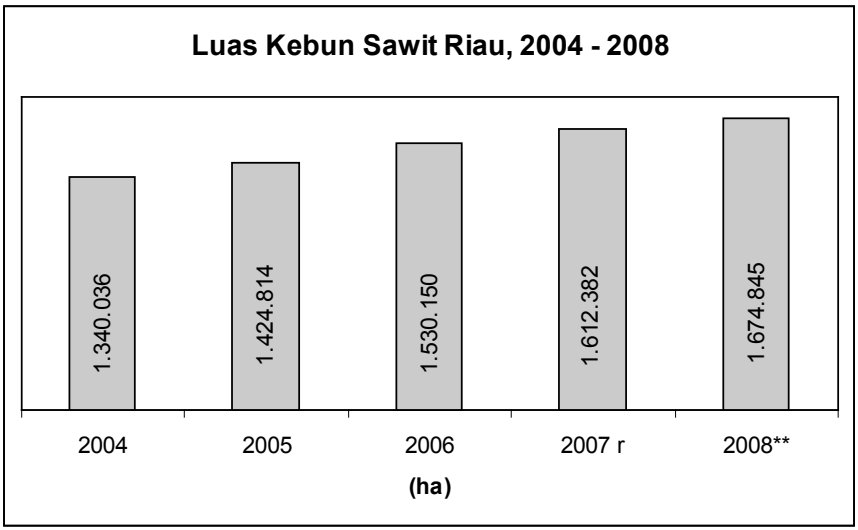

Keterangan, r: Angka Perbaikan
**: Angka Sementara

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau

Photo: © DTE

Kanan

Stasiun Pengumpul Minyak PT MEDCO di Payarumbai

Bawah

Sawit yang sudah dipanen siap untuk dibawa ke pabrik pengolahan kelapa sawit

Photo: © DTE

III
PAYA RUMBAI

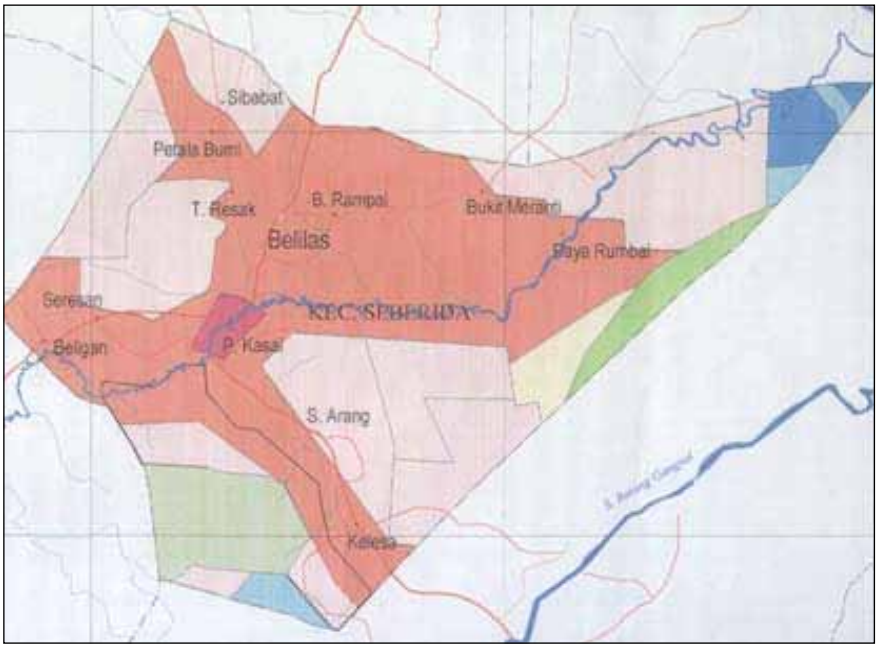

Sumber: http://www.inhu.go.id/kec_seberida.php

1. Potret Paya Rumbai

Desa Paya Rumbai berada di kecamatan Seberida adalah sebuah dusun tua yang namanya diambil dari kata Paya yang berarti rawa dan Rumbai yaitu sejenis tanaman yang biasanya hidup di rawa-rawa.

Dari 11 desa yang ada di kecamatan Seberida, tujuh diantaranya adalah eks transmigrasi termasuk Desa Paya Rumbai. Transmigrasi masuk ke wilayah ini pada sekitar tahun 1980-an tetapi sebagian besar warga transmigran sekarang berada di desa tetangga Paya Rumbai, seperti desa Bukit Meranti, Buluh Rampai, Seresam dan lainnya.

Jumlah penduduk desa ini pada tahun 2009 adalah 5.355 orang yang terdiri dari 1.475 kepala keluarga.[79]

Masyarakat desa Paya Rumbai 90% adalah suku Melayu dan sisanya adalah pendatang dari Batak, Minang dan Jawa. Mata pencaharian mereka adalah petani karet (10 %), petani sawit (5%), petani sawah (5%), nelayan (25%), buruh (40%), pedagang (5%), guru (5%) dan lain-lain (5%).[80]

Luas penggunaan lahan di desa Paya Rumbai

Lahan Sawah (ha)	Lahan Kering (ha)			
	Ladang/kebun/ Kolam dll	Perkebunan	Perumahan/ Pemukiman	Lainnya
60	520	3.200	65	6.380

Sumber: Buku penggunaan potensi daerah Kab. Inhu, 2002[81]

Tidak ada data resmi mengenai hutan. Menurut sekretaris desa, tidak ada lagi hutan desa karena semua sudah digunakan oleh perkebunan skala besar.

2. Satu desa, lima perusahaan

Ada lima perusahaan yang beroperasi disekitar desa Paya Rumbai, yaitu: PT Medco Energi Internasional, PT Kencana Amal Tani dan PT Banyu Bening Utama, PT Alam Sari Lestari dan PT Wahana Mandiri Indonesia.

PT Medco Energi International

Meta Epsi Drilling Company (Medco) adalah perusahaan pertambangan dan energi berskala internasional yang dibangun oleh pengusaha nasional yaitu Arifin Panigoro.[82]

Kantor perusahaan terletak di Kecamatan Lirik dan sumur pengeborannya di lapangan Parum, dekat Kota Rengat. Perusahaan ini sudah beroperasi di daerah tersebut sejak Desember 1995.[83] Letak kilang penampungan minyak sekitar 15 menit perjalanan sebelum masuk ke desa Paya Rumbai.

Menurut masyarakat, perusahaan ini pernah menawarkan untuk memberikan aliran listrik. Sayangnya ketika seorang warga menolak untuk menebang pohon petai pada jalur yang akan dijadikan perlintasan kabel listrik, perusahaan ini membatalkan niatnya. Hingga saat ini, tidak ada aliran listrik yang masuk ke desa Paya Rumbai padahal orang yang menolak tersebut sudah lama meninggal. Alasan penolakannya karena tidak ada kecocokan harga untuk pohon petai yang akan ditebang.

79 Kecamatan Seberida dalam Angka, 2010.
80 Pengumpulan data lapangan Yayasan Elang.
81 http://www.inhu.go.id/seberida/infoumum02.php
82 http://www.mail-archive.com/stikom_tk@yahoogroups.com/msg00173.html
83 http://bankdata.depkes.go.id/kompas/Kabupaten%20Indragiri%20Hulu.pdf

PT Kencana Amal Tani dan PT Banyu Bening Utama

PT Kencana Amal Tani (KAT) memiliki kebun kelapa sawit seluas 5.375 ha, sementara PT Banyu Bening Utama (BBU) mendapatkan izin perkebunan seluas 5.495,94 ha. Kedua perusahaan ini merupakan anak perusahaan Kelompok Duta Palma.[84]

Kelompok Duta Palma adalah perusahaan nasional yang juga dikenal sebagai kelompok Surya Darmadi. Perusahaan ini berkegiatan di sektor perkebunan kelapa sawit dan karet.[85] Perusahaan kemudian bergabung menjadi anggota RSPO pada Mei 2007.

Laporan yang dipublikasi oleh Greenpeace (GP) pada 2007 lalu menyebutkan bahwa kelompok perusahaan ini adalah salah satu dari tiga perusahaan besar perusak hutan di Indonesia. Argumentasi yang diberikan karena perusahaan ini ternyata masih melakukan pembukaan lahan dengan melakukan pengeringan dan pembakaran pada lahan gambut. Padahal kelompok ini memiliki 200.000 hektare konsesi di lahan gambut, dan sepertiganya berada di Riau.[86]

Di Paya Rumbai, sebagian kebun perusahaan berada di kawasan hutan masyarakat. Menurut Sekretaris Desa yang ditemui Nopember 2007 menyebutkan masing-masing perusahaan ini berada di 1.000 ha lahan hutan masyarakat. Namun, tidak satupun masyarakat Paya Rumbai yang dipekerjakan oleh perusahaan ini. Menurut bagian personalia perusahaan, 60% pekerja perkebunan ini adalalah pendatang dari luar Riau.

Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan kebun plasma tidak diberikan oleh perusahaan. Tuntutan ini muncul karena perusahaan mengambil lahan desa seluas 2.000 ha. Oleh pihak perusahaan tuntutan masyarakat ini sudah dipenuhi dengan memberikan uang ganti rugi sebesar Rp150 juta dengan sebutan dana bina desa. Jika dianggap bahwa uang tersebut adalah ganti rugi tanah, maka berarti perusahaan membeli tanah masyarakat seharga Rp75.000 per hektare atau Rp7,5 per meter persegi.

Konflik yang dimulai dari tahun 2003 hingga kini masih belum terselesaikan juga. Masyarakat desa Paya Rumbai heran mengapa perusahaan ini tidak mau melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kebun sawit.

PT Alam Sari Lestari

PT Alam Sari Lestari (ASL) mendapatkan mendapatkan izin pada tahun 1989 dengan luas kebun 2.000 ha untuk kebun plasma dan 5.588 untuk kebun inti. Perusahaan ini merupakan gabungan antara pengusaha nasional yaitu Nunung Darajatun dengan seorang pengusaha Malaysia bernama H. Zainal,[87] yang dikenal oleh masyarakat dengan panggilan Datuk.

84 Kompilasi Data Perkumpulan Elang, 2007
85 Surya Darmadi, situs Indonesia Today oleh Yosef Ardi (yosef-ardi.blogspot.com), 11 Juli 2006.
86 http://www.sinarharapan.co.id/berita/0804/07/kesra01.html
87 Catatan temuan lapangan, Perkumpulan Elang 2005.

Sementara ini perusahaan baru mampu membuka kebun plasma dan itu dilakukan pada tahun 2000 – 2003 seluas 2.000 ha dan diperuntukkan bagi 1.000 KK di desa Talang Jerinjing dan Paya Rumbai. Setiap kepala keluarga di Paya Rumbai mendapatkan bagian dua hektare.

Pengelolaan kebun plasma dilakukan langsung oleh perusahaan, masyarakat hanya menerima pembagian hasil dengan perbandingan 30:70, dengan porsi terbesar adalah untuk perusahaan. Penyaluran pembagian hasil dalam bentuk uang diurus oleh koperasi di tiap desa. Ketika ditanyakan kepada pihak perusahaan kenapa tidak menyerahkan pengelolaan kebun kepada masyarakat, jawabannya adalah karena mereka menganggap masyarakat belum mampu mengelola kebun kelapa sawit.

Kebun inti saat ini belum dibuka dengan alasan belum ada modal yang cukup. Lokasi perusahaan yang berada di tanah rawa membuat pihak perusahaan memerlukan tambahan dana untuk membuka kebun inti. Sementara ini hanya 700 ha kebun plasma yang mampu dipanen, sisanya belum bisa terangkut. Kondisi jalan yang buruk menghambat jalur pengangkutan buah kelapa sawit ke tempat penjualannya.

Hasil panen sawit selanjutnya dijual ke PT Inecda atau PT KAT atau perusahaan pengolah kelapa sawit (PKS) lainnya yang ada di sekitar Kabupaten Inhu. Syaratnya adalah siapa yang bisa memberikan harga lebih tinggi.

Dukungan perusahaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Paya Rumbai adalah berupa bantuan langsung jika ada kegiatan di desa. Misalnya ketika ada pemilihan kepala desa, peringatan hari kemerdakaan setiap Agustus, dll.

Perusahaan ini belum pernah mendengar sama sekali mengenai Kelompok mejabundar untuk minyak sawit lestari (RSPO). Mereka berpikir sertifikat lestari untuk minyak sawit ini sama dengan sertifikat untuk benih tanaman.

PT Wahana Mandiri Indonesia

PT Wahana Mandiri Indonesia (WMI) berdiri pada tahun 2001 dengan salah satu pemegang modalnya adalah mantan menteri BUMN yaitu Sugiharto.

Perusahaan ini memiliki luas ± 988 ha,[88] dengan jumlah karyawan 200 orang yang mayoritas adalah pendatang dari pulau Jawa (Jawa dan Sunda). Lahan perusahaan didapatkan dengan membeli tanah masyarakat. Jumlah mitra harian lepas (MHL) – nama lain dari buruh harian lepas – tidak jelas karena dikoordinir oleh Kepala Rombongan (KR) dan jumlahnya pun tidak tetap tergantung pada kebutuhan,

Rahmat, bagian Personalia, mengatakan bahwa saat ini perusahaan belum mampu membuat PKS (pengolahan kelapa sawit) karena belum bisa memenuhi kapasitas pabrik. Saat ini baru ada 512 tanaman siap panen dan 225 pohon sisip.

Untuk memudahkan pekerjaan mereka membagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari:

1. Perawatan:
   a. Pemupukan:
      - sawit besar
      - sawit sisip
      - sawit tumbuh

88 http://hbn-group.com/hbn/agriculture.html

b. Ngenggrek (memotong tunas sawit tua)
c. Tunas gawangan (membersihkan rumput di sekitar pohon tua)

2. Pemanenan:
   a. dodos (memotong TBS dari pohon), brondolan (mengumpukan butiran buah sawit yang jatuh dari pohon)
   b. TPH (diangkut ke tempat peletakan buah)
3. Pengangkutan ke pabrik terdekat (Pengolahan Kelapa Sawit)

Sementara ini hasil panen diantar ke salah satu dari empat PKS yang berada di kKab. Inhu, yaitu PT Sari Lembah Subur, PT Ineckda, PT KAT, dan NHR.

Dukungan yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat desa selain mempekerjakan MHL yaitu dengan memberikan bantuan seperti teh dan gula setiap bulan untuk para tenaga pengajar setiap bulan dan makanan tambahan untuk taman kanak-kanak (TK).

Sama seperti PT ASL, karyawan perusahaan yang ditanyai menyatakan belum pernah mendengar mengenai RSPO tapi berharap para atasannya sudah tahu. Alasannya karena mereka hanya mengelola kebun.

3. Fasilitas Desa

Jalan masuk menuju desa ini sebagian besar masih berupa jalan tanah yang bergunduk-gunduk akibat erosi yang terasa licin di waktu hujan dan berdebu di saat musim panas. Sebagian lagi sudah diberi pengerasan dan batu sehingga tidak licin ketika hujan tapi tetap berdebu ketika musim panas. Tidak ada angkutan umum yang masuk ke sana. Untuk ke sana kita harus menyewa ojek atau mobil atau berjalan kaki.

Sekitar 1 atau 2 kilometer sebelum memasuki desa, di kanan kiri jalan terhampar kebun kelapa sawit milik PT WMI. Memasuki desa Paya Rumbai, di sebelah kanan dari arah kedatangan ada lapangan luas yang seringkali digunakan sebagai lapangan sepak bola di sore hari. Setelah itu sekitar 300 – 500 meter dari arah gerbang desa terhampar lagi kebun sawit milik perorangan. Di pinggiran jalan dan di halaman samping beberapa rumah penduduk terlihat pohon pinang, yang ternyata digunakan oleh masyarakat sebagai pembatas wilayah.

Jalanan desa ini sebagian masih berupa jalan tanah yang berbatu, sebagian bersemen dengan kondisi rusak dan berlubang dan sebagian lagi bagus karena baru dapat bantuan semenisasi di awal 2008 lalu. Ukuran jalan desa ini relatif kecil tapi truk kecil untuk mengangkut sawit dan kayu masih bisa masuk ke desa ini.

Begitu memasuki desa, di sebelah kiri ada rumah besar milik Rusman, mantan Kepala desa, di depan rumah ada lapangan bola, dan di samping lapangan bola ada sebuah rumah bercat putih dan biru, yang ternyata merupakan salah satu dari 10 unit bantuan rumah sehat sederhana yang diperoleh desa ini. Beberapa bantuan yang pernah didapatkan selain rumah adalah:

- Perluasan lahan tanaman sawah dalam bentuk bibit, pupuk, ikan mas tambak, dan herbisida
- Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dari Dinas Kesehatan untuk sarana mandi, cuci dan kakus (MCK) sebanyak 10 unit pada periode 2005/2006
- Tahun 2008 mereka mendapatkan bantuan untuk semenisasi jalan senilai Rp350 juta dan
- Pembuatan sumur air bersih yang rencananya akan mendapat bantuan senilai Rp300 juta.

Di malam hari, jalan menuju desa ini gelap. Tidak ada lampu jalan kecuali di sekitar kilang minyak PT MEDCO dan di perkantoran PT WMI. Di dalam desa beberapa rumah menggunakan mesin diesel atau yang sering di sebut jenset (genset) dan sebagian lagi masih menggunakan lampu petromak atau pelita.

Sebagian besar warga desa masih mengandalkan sungai Rumbai yang merupakan anak sungai Indragiri untuk keperluan mandi, mencuci dan air bersih. Meskipun ada sumur bantuan tapi tidak semua masyarakat memanfaatkannya untuk keperluan sehari-hari.

Hari pasar di desa ini adalah Senin, dari sekitar pukul 06.00 pagi hingga tengah hari, sekitar pkl 12.00 atau 13.00 siang. Pedagang pasar datang dari desa tetangga bahkan ada yang datang dari Belilas/Pangkalan Kasai, ibukota kecamatan yang berjarak 16 km dari Paya Rumbai.[89] Barang dagangan yang dipasarkan adalah, sayur-sayuran, pakaian, mainan anak-anak, beras, gula, sabun, peralatan rumah tangga, dll. Terkadang warga tidak bisa menemukan semua keperluan yang diinginkan, karena itu mereka akan mencari ke Belilas.

Fasilitas pendidikan yang ada di desa ini hanya taman kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD). Jumlah pengajarnya untuk guru TK ada dua orang, untuk SD ada 12 orang dengan pembagian empat orang guru tetap, dua orang honorer dan sisanya adalah tenaga kontrak.

Untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, seperti Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Perguruan Tinggi (PT), anak-anak mereka harus ke desa tetangga, seperti ke desa Bukit Meranti, Belilas, Rengat atau langsung ke Pekanbaru. Tak jarang, karena jarak untuk ke desa tetangga dirasa terlalu jauh sebagian besar mereka memilih untuk berhenti hingga selesai SD. Tapi sekarang banyak diantara mereka yang mau menyelesaikan sekolah sampai SLTA.

Desa ini hanya memiliki satu tenaga kesehatan, yaitu seorang bidan. Kalau ada warga yang sakit dan perlu pemeriksaan, mereka harus ke Belilas untuk mendapatkan pertolongan dari dokter atau rumah sakit. Setiap kali berangkat mereka harus menyewa mobil warga setempat. Biaya yang dikenakan sekitar Rp150.000 – 200.000, belum termasuk biaya berobat. Jika dibandingkan dengan harga ganti rugi tanah yang dibayarkan oleh Duta Palma maka biaya ini setara dengan harga 2 – 3 ha tanah masyarakat.

89 Kecamatan Seberida dalam Angka, 2010

4. Petani dan Nelayan

Pelan tapi pasti, luasan hutan desa berkurang setiap tahun. Pengurangan hutan desa dilakukan baik untuk membuka perkebunan masyarakat maupun oleh perusahaan. Pembukaan lahan hutan oleh masyarakat dilakukan dengan berbagai tujuan. Ada masyarakat yang membuka hutan untuk dijadikan sawah dan kebun dan ada yang membuka hutan karena memang pekerjaan mereka adalah sebagai penebang kayu di hutan.

Penebangan kayu mulai marak sekitar tahun 1970-an. Hingga kini beberapa orang masih bertahan sebagai penebang kayu meski pemerintah sudah menyatakan tindakan itu adalah salah dan bisa dikenakan sanksi berupa hukuman penjara. Namun masih ada sebagian kecil masyarakat yang mengerjakan. Alasannya karena hasil dari menebang kayu lebih besar daripada sebagai pekerja di perusahaan atau nelayan.

Meski demikian, risiko pekerjaan ini besar, mulai dari patah tulang hingga kematian akibat tertimpa pohon-pohon besar yang ditebang. Pada kunjungan pertama di desa ini, ada dua orang warga yang tertimpa kayu dan patah tulang.

Ketika ditanyakan pada kaum ibu, kenapa tidak melarang suami menebang kayu, jawaban yang diberikan beragam. Ada yang bilang bahwa ia ingin melarang suami untuk menebang kayu tapi apa pekerjaan lain yang bisa didapatkan? Ada lagi yang menjawab bahwa setiap pekerjaan itu pasti ada risiko, jadi harus dihadapi.

Masyarakat yang membuka hutan untuk berkebun ini terbagi menjadi dua. Pertama adalah mereka yang benar-benar serius untuk menggarap lahan, dan kedua adalah mereka yang membuka hutan sebagai prasyarat untuk mendapatkan surat tanah dari pemerintahan desa dan kemudian menjual lahan tersebut kepada pihak lain yang sebagian besar adalah pendatang dari luar desa.

Dampak dari pengurangan hutan mulai dirasakan oleh masyarakat. Para nelayan mulai kesulitan mendapatkan ikan. Ketika musim kemarau tiba sungai cepat surut dan ketika musim penghujan datang banjir pun tak terelakkan.

Jika dulu dalam waktu semalam mereka bisa mendapatkan ikan banyak hingga hanya dihargai sekitar Rp2.000-an per kilogram. Kini mereka harus bermalam di sungai dan mencari ikan hingga ke muara sungai. Tidak heran harga ikan seperti lais (Kryptopterus bichirrhis) bisa mencapai Rp20.000-an jika ada yang bisa mendapatkan.

Selain dari pengurangan hutan, pembuatan kanal perkebunan yang dilakukan oleh PT KAT, ternyata membuat sekitar 38 sungai mati dan 13 danau rusak.[90]

Bagi para pengumpul rotan, pengurangan hutan berakibat pada hasil rotan yang bisa dikumpulkan. Seorang pengumpul rotan yang merintis usaha sejak datang ke desa Paya Rumbai sejak sekitar tahun 1980-an terpaksa menutup usahanya di pertengahan tahun 2007 lalu.

Seorang bapak mengatakan, andaikan masih banyak sumber pendapatan yang bisa diperoleh dari desa ini maka tidak mungkin banyak masyarakat yang mau menjadi pekerja di perkebunan kelapa sawit. Saat ini banyak masyarakat berebut untuk

90 Hasil pengumpulan data Yayasan Elang. 2008.

menjadi buruh di kebun sawit, karena hasil hutan sudah tidak banyak, ikan sulit didapat dan hutan yang bisa dijadikan kebun tinggal sedikit. Jika saat ini sebagian masyarakat masih bisa bertahan, bagaimana dengan 10 atau 15 tahun kemudian?

5. Petani Plasma

Dari empat perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di sekitar desa Paya Rumbai, hanya dengan PT ASL masyarakat mendapatkan bagian kebun plasma. Kebun plasma ini diperoleh masyarakat setelah menyerahkan ±1.000 ha lahan desa kepada perusahaan melalui Koperasi Perintis yang berdiri sejak tahun 1994.

Koperasi yang beranggotakan seluruh kepala keluarga di Paya Rumbai menjadi penghubung antara masyarakat dengan perusahaan. Koperasi lah yang mengatur pembagian lahan dan hasil kebun yang didapat oleh masyarakat.

Meski memiliki kebun plasma, ternyata tak satu pun masyarakat desa yang tahu di mana letak kebun yang telah dialokasikan kepada masing-masing petani melalui pembelian dengan sistem KKPA. Awalnya, penduduk desa menyerahkan lahan 1000 hektare untuk dijadikan kebun sawit. Setelah siap, masyarakat berkewajiban membayar biaya pembukaan kebun melalui KKPA. Setiap bulan perusahaan memotong pendapatan masyarakat untuk kredit pembangunan perkebunan, pupuk dan beberapa biaya lainnya. Masyarakat tidak tahu berapa sesungguhnya harga yang seharusnya mereka dapatkan dari kebun plasma. Mereka hanya tahu bahwa kebun dikelola oleh perusahaan dan untuk itu perusahaan mendapatkan 70% dari hasil kebun.

Sejak kebun sawit mulai menghasilkan di tahun 2005 mereka mulai mendapatkan pembagian hasil sebesar Rp30.000 per bulan dan untuk tahun 2008 hasil yang diperoleh baru sekitar Rp100.000-an per bulan. Menurut masyarakat hasil ini terlalu kecil untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.

Merasa ditipu, sebagian besar masyarakat menjual kebun plasma ke pihak lain. Harga jual beragam, ada yang Rp8 juta, Rp11 juta, Rp15 juta, terakhir untuk tahun 2008 penjualan kebun mencapai Rp30 juta. Menurut ketua koperasi tinggal ± 20% anggota masyarakat yang masih memiliki kebun plasma perusahaan, tapi menurut masyarakat paling banyak hanya sekitar 10 KK.

6. Pekerja Kebun Sawit

Pekerjaan yang didapat oleh masyarakat dari perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagian besar adalah sebagai buruh harian lepas atau yang oleh PT WMI diperhalus menjadi mitra harian lepas (MHL). Selain sebagai MHL, hanya tiga orang warga yang berkesempatan bekerja di PT ASL. Dua diantaranya menjadi karyawan dan yang seorang lagi menjadi Satpam.

Pekerja di PT WMI terbagi menjadi tiga kelompok yang diketuai oleh seorang kepala rombongan atau yang biasa disebut KR. Pekerjaan mereka adalah sebagai pemupuk kebun, yang dibagi menjadi:

- Kelompok sawit besar, untuk pohon yang sudah mulai menghasilkan buah

- Kelompok sawit baru, untuk pohon yang baru ditanam
- Kelompok sawit sisip, untuk pohon sawit yang disisipkan di antara pohon yang sudah menghasilkan

KR bertanggung jawab untuk seluruh anggotanya. Ia menjadi penghubung antara anggotanya dengan perusahaan. Dari setiap anggota yang mendapatkan pekerjaan ia mendapatkan ucapan terimakasih sebesar Rp1.000 – 5.000. Harga ini merupakan hal yang pantas menurut masyarakat.

Seandainya ada anggota KR yang berhalangan bekerja ketika ada panggilan dari kerja, mereka akan berusaha mendapatkan pengganti dari anggota keluarganya sendiri. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa mereka masih bisa kembali sewaktu-waktu. Sekali mereka keluar dari KR maka sulit untuk mereka kembali menjadi anggota, karena antrian orang yang mau menjadi pekerja di kebun sawit dari waktu ke waktu semakin banyak.

Setiap kelompok memiliki waktu kerja yang berbeda-beda. Ketika kelompok sawit besar memupuk maka dua kelompok lainnya tidak bekerja. Lama bekerja adalah tergantung luasan kebun yang harus diberi pupuk, sekitar 14 – 20 hari kerja. Setiap kelompok mendapatkan kesempatan bekerja dua bulan sekali.

Pada kunjungan Nopember 2007 lalu, kelompok sawit besar mendapatkan giliran kerja selama 20 hari. Setiap sekitar pkl 07.00 pagi mereka dijemput dengan truk pengangkut sawit yang disewa oleh perusahaan. Setiba di perusahaan sebagian dari mereka membeli makanan, atau bersenda gurau sambil menunggu truk pengangkut mereka diisi dengan pupuk. Biasanya para pekerja laki-laki yang mengangkut pupuk dari gudang. Setelah itu bersama-sama dengan truk berisi pupuk mereka ke bagian kebun yang memerlukan pemupukan. Pemupukan dilakukan per jalur pohon sawit. Satu jalur dikerjakan oleh tiga orang, dua bekerja sebagai pemupuk dan seorang lagi sebagai pelangsir atau pembawa pupuk. Sekitar pukul 11.00 atau 12.00 mereka selesai mengerjakan kebun dan kembali ke kampung dengan diantar mobil pick up dari perusahaan.

Mei 2008, KR sawit besar yang ditemui kembali mengeluhkan terjadi perubahan kebijakan dari perusahaan. Masa kerja mereka berkurang namun jam kerja bertambah. Misalnya, Februari lalu mereka hanya bekerja selama tiga hari, kemudian dilanjutkan lagi ke Maret untuk tujuh hari kerja. Hingga saat kunjungan kedua dilakukan mereka tidak tahu kapan mereka bisa mulai bekerja lagi di kebun.

Sejak Februari, perusahaan menerapkan kebijakan baru yaitu menambahkan campuran pupuk, sehingga takaran pupuk yang harus diberikan pada setiap pohon bertambah. Penambahan takaran pupuk mengakibatkan waktu kerja masyarakat bertambah. Jika sebelumnya dengan takaran untuk satu pohon mereka bisa menyelesaikan pekerjaan sebelum makan siang, kini mereka baru bisa pulang ke rumah sekitar pkl 3 atau 4 sore.

Pengurangan masa kerja berdampak pada penghasilan mereka, karena sistem yang digunakan adalah kerja borongan. Setiap hektare kebun sawit yang dipupuk dihargai Rp25.000. Dalam sehari mereka mengerjakan sekitar 50-64 ha. Seandainya satu KR beranggotakan 30 orang dan dalam sehari mereka mengerjakan 50 ha maka upah yang didapatkan adalah Rp41.600 per orang. Upah ini menurut mereka lebih

besar dibandingkan pekerja di PT KAT yang menurut kabar hanya mendapatkan Rp25.000 per hari. Untuk pekerja laki-laki upah borongan masih ditambah dengan upah menaikkan pupuk ke mobil.

Sebagai informasi, UMR untuk kabupaten Indragiri hulu tahun 2006 adalah Rp756.000.[91] Jika dihitung hari kerja 20 hari maka upah didapatkan Rp37.800/hari. Terkesan memang sepadan (setidaknya dari PT WMI) tetapi pendapatan ini tidaklah berkesinambungan. Tergantung pada perusahaan, kapan mereka mau menggunakan tenaga masyarakat lagi.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Informasi mengenai cara dan takaran pemupukan diberikan oleh KR. Tidak ada pelatihan langsung dari perusahaan untuk para pekerja kebun mengenai bagaimana menggunakan alat keselamatan kerja saat menggunakan pupuk.

Perlengkapan bekerja untuk pemupuk yang disediakan oleh perusahaan adalah ember yang memuat sekitar 12,5 kg pupuk dan gayung untuk menyebarkan pupuk. Di awal-awal kerja perusahaan pernah menyediakan sarung tangan karet tapi karena dirasa panas, para pekerja berinisiatif mengganti dengan sarung tangan kain. Penyediaan sarung tangan hanya satu kali, setelah rusak para pekerja harus membeli sendiri.

Ketika memupuk, para pekerja tidak menggunakan penutup hidung, sehingga ketika pupuk disebarkan serbuk pupuk berterbangan di sekeliling mereka dan tanpa disadari terhisap oleh tubuh.

Pupuk non-organik yang digunakan untuk kebun kelapa sawit adalah pupuk tunggal dan pupuk majemuk.[92] Jenis pupuk tunggal ini seperti: Urea, Ammonium Nitrat (AN), Sulphate of Ammonia (SOA - ZA), Rock Phosphate (RP), Triple Super Phosphate (TSP), Single Super Phosphate (SSP), Muriate of Potash (MOP - KCl), Sulphate of Potash (SOP-ZK), Kieserite, Dolomit, Sulfur, Borate, Copper Sulphate (CuSO4.H2O), dan Langbeinite. Sedangkan jenis pupuk campuran yang digunakan adalah Diammonium Phosphate (DAP), NPK (12-12-17-2), NPK (15-15-6-4), dan NPK (15-15-15).

Jenis pupuk yang digunakan oleh pekerja di Paya Rumbai saat ini adalah urea, NPK, MOP, dolomit dan TSP. Saat ini bahkan untuk menghemat waktu semua jenis pupuk itu dicampurkan menjadi satu kali pemupukan saja. Masyarakat belum mendapatkan informasi akan bahaya dari penggunaan pupuk termasuk debu pupuk yang terhirup saat pemupukan dilakukan.[93]

Sebagai informasi, debu pupuk dapat menimbulkan iritasi mata dan kulit akibat kontak yang berulang atau jangka panjang. Selain itu paparan debu berlebih yang terhisap dapat menyebabkan iritasi saluran yang berhubungan dengan pernapasan.[94]

---

91 http://www.balitbang.riau.go.id/index.php?bahasa=&litbang=subhal&sublink=umr

92 http://niaga.pusri.co.id/Mupuk_Sawit/jenis_ppk.htm

93 Asosiasi Pupuk Internasional merekomendasikan agar petani menggunakan sarung tangan karet dan penutup hidung saat melakukan pemupukan. Lihat: http://www.fertilizer.org/ifa/Home-Page/SUSTAINABILITY/Human-health/Fertilizer-products.html.

94 http://www.pupukkaltim.com/img/images//page/MSDS%20Pupuk%20Majemuk.pdf

Bahaya Pestisida

Sebagai tanaman monokultur, kelapa sawit memerlukan banyak bahan kimia, termasuk pupuk dan pestisida. Terdapat sekitar 25 jenis pestisida yang berbeda yang digunakan di perkebunan kelapa sawit. Tetapi, karena tidak adanya pengawasan dan dokumentasi yang baik, pemantauan terhadap penggunaannya masih sulit dilakukan.[95]

Pestisida meracuni manusia melalui kulit, pernapasan dan mulut. Menurut data PAN (Pesticide Action Network) 90% keracunan pestisida terjadi melalui kulit.[96] Dalam beberapa kasus keracunan pestisida langsung, petani dan para pekerja di pertanian lainnya terpapar (kontaminasi) pestisida pada proses mencampur dan menyemprotkan pestisida.

Secara khusus, menyemprot sangat berbahaya bagi wanita. Hal ini karena beberapa jenis pestisida mengakibatkan kerusakan reproduksi dan dapat menyakiti anak dalam kandungan. Pestisida juga dapat menyebabkan kanker payudara dan meracuni ASI. Banyak juga wanita penyemprot yang mengalami gangguan peranakan.[97]

Menurut Cancer Research UK, sebuah organisasi independen yang memfokuskan pada penelitian kanker (bermarkas di Inggris), pestisida mempunyai potensi menyebabkan kanker, terutama kanker payudara (breast cancer), kanker usus (bowel cancer), kanker getah bening (lymphomas) dan leukaemia.[98]

Beberapa peneliti AS, pada September 2009 mengumumkan hasil studi mereka yang menunjukkan bahwa pekerja yang menggunakan pestisida memiliki risiko 80 persen lebih tinggi terkena parkinson.[99] Ciri-cirinya, pertama, gemetar tak terkontrol di tangan atau kaki saat istirahat. Kedua, kaku anggota gerak. Ketiga, gerakan melambat, gangguan berjalan, dan gangguan keseimbangan.[100]

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh PAN AP (Pesticide Action Network Asia & the Pacific) menyatakan bahwa belum ada statistik yang akurat mengenai dampak pestisida bagi kesehatan. Namun, diperkirakan secara global, setiap tahun, antara 1 – 41 juta orang terkena dampak terhadap kesehatan akibat paparan pestisida (PAN Internasional, 2007). WHO (2009) memperkirakan minimal 300.000 orang mati karena keracunan pestisida setiap tahun, 99% diantaranya berasal dari negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Pada tahun 2008, Bank Dunia menyebutkan angka

95 Sulistiyono, L. *Dilema penggunaan pestisida dalam system pertanian tanaman hortikultura di Indonesia.* IPB. 2004

96 Yayasan Duta Awam – Pesticed Action Network AP. *Pestisida berbahaya bagi kesehatan.* 1999

97 *Dampak pestisida pada kesehatan manusia.* http://mathedu-unila.blogspot.com/2009/10/dampak-pestisida-terhdap-kesehatan.html

98 *Pestisida dan Kanker.* 15 Oktober 2009. http://mathedu-unila.blogspot.com/2009/10/pestisida-dan-kanker.html

99 *Antara News*, 15 September 2009. 'Penggunaan pestisda dapat picu parkinson'

100 http://www.ikatanapotekerindonesia.net/farmasi-komunitas/seputar-kesehatan/1354-apa-itu-parkinson-.html

kematian 355.000 orang. Namun, FAO (2005) merujuk ke data Sri Lanka yang mengungkapkan 300.000 orang mati per tahun hanya di wilayah Asia-Pasifik saja".[101]

Di Indonesia, pada tahun 2003, ada 317 kasus keracunan pestisida, meski tidak terlaporkan.[102] Hasil uji darah yang dilakukan oleh Sawit Watch tahun 2006 kepada 25 petani kelapa sawit di Kalimantan Timur – 9 diantaranya adalah perempuan – menemukan bahwa 16 orang memiliki kadar racun dalam darah tinggi, 1 orang darahnya tidak mengandung racun, dan sisanya memiliki kadar racun rendah.[103]

Photo: © DTE

Photo: © DTE

Photo: © DTE

Paling atas

Pemupukan dilakukan oleh perempuan tanpa menggunakan penutup hidung

Atas

Kiri: Karung bekas pupuk TSP yang digunakan diperkebunan kelapa sawit
Kanan: Seorang pekerja pemupukan tertawa diantara tebaran debu-debu pupuk

101 PANAP. *Communities in Peril. Asian regional report on community monitoring of highly hazardous pesticide use.* 2010.
102 Strong, G. et. al. *Memecah Kebisuan. Perkebunan dan Pestisida.* YDA. 2000
103 Catatan pertemuan Task Forces Smallholders, Malaysia 2007.

IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Minyak Sawit Belum untuk Rakyat

Di saat harga minyak sawit naik di pasar dunia, harga minyak goreng dalam negeri ikut naik. Minyak sawit yang sebagian besar digunakan sebagai bahan baku minyak goreng langka di pasar dalam negeri. Masyarakat kembali menjadi korban kelangkaan minyak goreng. Harga minyak menjadi naik seiring kenaikan harga di pasar global.

Bagaimana mungkin negara produsen minyak sawit dunia mengalami kelangkaan di dalam negeri? Andaikan sektor ini memang untuk kesejahteraan masyarakat tentunya kelangkaan minyak goreng tidak perlu terjadi.

Sebaliknya ketika harga minyak dunia turun, lagi-lagi masyarakat – khususnya petani kelapa sawit – yang harus menanggung akibatnya. Banyak petani kelapa sawit jatuh miskin karena kebun kelapa sawit yang menjadi tumpuan nilainya tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya.

Buruh di tanah sendiri.

Mengutip petuah bijak dari orang-orang tua dulu, bahwa 'pengalaman itu adalah guru yang baik', apa yang terjadi di desa Paya Rumbai merupakan sebuah pengalaman nyata bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit bukan satu-satunya obat mujarab untuk menyembuhkan penyakit kemiskinan dan pengangguran.

Sebaliknya, pembangunan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran menghilangkan kesempatan masyarakat untuk mengelola hutan dan mendapatkan penghasilan yang layak. Jika saat ini, masyarakat di desa ini masih bisa bertahan, apa yang akan terjadi jika hutan tidak ada dan hanya perusahaan perkebunan sawit yang tersisa? Mereka semua akan menjadi buruh di desa sendiri.

Pembukaan perkebunan kelapa sawit tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Sektor ini juga menciptakan pengangguran-pengangguran baru dari masyarakat yang sebelumnya adalah petani di desa. Masyarakat yang semula adalah tuan di tanahnya sendiri sebagian kini berubah status menjadi buruh perusahaan yang dulu adalah tanahnya sendiri.

Tidak ada jaminan kesehatan untuk pekerja perkebunan

Kesehatan dan keselamatan pekerja perkebunan kelapa sawit belum menjadi perhatian pihak perusahaan. Informasi mengenai bahaya bahan-bahan kimia yang digunakan di sektor ini tidak pernah disampaikan kepada masyarakat. Bahkan, tidak ada penyediaan alat bantu keselamatan bagi pekerja yang bersentuhan langsung dengan bahan-bahan kimia.

Laporan ini diharapkan menjadi tambahan informasi bagi pemerintah, dan perusahaan bahwa masih banyak hal yang harus diselesaikan di perkebunan kelapa sawit. Menambah luasan perkebunan sebelum menyelesaikan permasalahan akan membuat masyarakat miskin yang ada di desa semakin miskin dan terpuruk.

Rekomendasi

Untuk Pemerintah Indonesia

Peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah di perkebunan kelapa sawit adalah penting, untuk itu kami meminta untuk:

- Memaksimalkan perkebunan kelapa sawit yang sudah ada dan bukan melakukan perluasan untuk meningkatkan produksi minyak sawit. Terbukti, masih banyak lahan-lahan perkebunan yang belum dikelola dengan baik.
- Membuat sebuah mekanisme untuk mengawasi dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak menepati janji dengan masyarakat.
- Memastikan bahwa perusahaan benar-benar menerapkan prinsip Padiatapa ketika berhadapan dengan masyarakat adat dan memastikan bahwa kesepakatan negosiasi dan kompensasi adil bagi masyarakat lokal Ini berarti sebelum sebuah pembangunan dimulai, masyarakat lokal paham mengenai untung rugi kehadiran perusahaan besar di wilayahnya.
- Menghentikan sementara perluasan perkebunan kelapa sawit hingga prinsip Padiatapa diterapkan.
- Mengkaji ulang kebijakan skema kredit perkebunan yang mengikat masyarakat dalam hutang yang berkepanjangan.
- Memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja di perkebunan kelapa sawit harus diperhatikan dan diperbaiki. Pemerintah harus mewajibakan perusahaan untuk menyediakan alat keselamatan kerja bagi pekerja yang bersentuhan langsung dengan bahan-bahan kimia.
- Melakukan pelatihan atau pendidikan mengenai hak pekerja atas kesehatan dan keselamatan kerja.
- Mendukung kegiatan-kegiatan pengelolaan berbasis masyarakat sebagai penyeimbang skema sistem perkebunan skala besar.
- Menindaklanjuti hasil temuan mengenai hubungan antar kemiskinan dan perkebunan kelapa sawit melalui penelitian lebih lanjut.

Internasional

Peran dunia internasional dalam sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia besar. Kebutuhan minyak nabati untuk isu energi mendorong perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Untuk itu kami meminta kepada pemerintah, lembaga-lembaga internasional dan sektor swasta :

- Jangan menginvestasikan dana untuk proyek-proyek perkebunan kelapa sawit yang merusak dan memiskinkan masyarakat lokal.
- Menunda kebijakan penggunaan energi nabati hingga ada perlindungan efektif terhadap penerapan hak asasi manusia, penghidupan masyarakat dan lingkungan;
- Menindaklanjuti hasil temuan mengenai hubungan antara kemiskinan dan perkebunan kelapa sawit melalui penelitian lebih lanjut.
- Mendukung kegiatan-kegiatan pengelolaan berbasis masyarakat sebagai penyeimbang skema sistem perkebunan skala besar.

Photo: © DTE

Paling Atas
Mendodos kelapa sawit

Atas kiri
Membuat sapu lidi untuk keperluan rumah tangga

Atas kanan
Membersihkan ikan hasil tangkapan setelah berhari-hari dan bermalam dimuara sungai Cenaku

Kiri:
Mencuci di sungai adalah rutinitas sehari-hari para ibu rumah tangga di Paya Rumbai

Buruh di tanah sendiri

Bagian ini sengaja dibuat untuk memberikan informasi terbaru mengenai situasi masyarakat desa Payarumbai. Pada kunjungan Nopember 2010, banyak informasi baru terkait dengan keberadaan perusahaan dan masyarakat di desa Payarumbai.

Para pekerja kebun kelapa sawit di PT WMI sebagian besar, khususnya pekerja perempuan sebagian besar sudah tidak bekerja lagi menjadi pemupuk karena pohon yang harus dipupuk sudah tidak ada lagi. Pekerjaan yang ada saat ini seperti menyemprot hama, dan mendodos dan membuang pelepah sawit dirasa lebih berat dari pekerjaan sebelumnya. Apalagi alat penyemprot hama itu terasa berat dipunggung. Jadi yang mereka lakukan saat ini hanya tinggal dirumah atau mengerjakan kebun bagi mereka yang masih memiliki lahan kebun.

Sejak kepemilikan PT ASL diambil alih kepemilikannya oleh Sugiharto, salah seorang pemegang saham di PT WMI, banyak warga desa yang bekerja di kebun tersebut. Pekerjaan mereka adalah untuk membuka kebun-kebun plasma yang ternyata selama ini belum dikelola dengan baik oleh perusahaan.

Saat ini mata pencaharian utama masyarakat Payarumbai adalah menjadi pekerja atau dengan kata lain mereka menjadi buruh. Baik untuk perkebunan kelapa sawit atau pun buruh lepas di pemilik-pemilik kebun yang ada didesanya. Hal ini terjadi karena sebagian besar warga menjual lahan-lahannya kepada pendatang, sehingga lahan kebun pendatang semakin luas sementara lahan mereka semakin sedikit.

Menurut salah seorang warga, ada tiga kelompok tipe masyarakat di desa Payarumbai. Kelompok pertama adalah masyarakat yang berpikir untuk hidup mandiri, dengan membuka kebun-kebun sendiri; kelompok kedua adalah mereka berpikir hidup hanya untuk hari ini; dan kelompok ketiga adalah mereka yang berpikir untuk menghabiskan apa yang ada dan kelompok ini jumlahnya paling banyak dan sudah menjual lahan-lahan yang mereka miliki.

Bapak ini merasa dirinya sebagai bagian dari kelompok pertama. Komentarnya tersebut mencerminkan fakta bahwa ada perbedaan tingkatan akses terhadap informasi dan sumberdaya alam di desa ini. Ini pada akhirnya mencerminkan ketidakseimbangan kekuatan antara pendatang dan penduduk lokal. Masih tidak jelas apakah ketidakseimbangan

diperparah oleh hadirnya perusahaan perkebunan kelapa sawit – yang memiliki kekuatan lebih daripada kelompok masyarakat.

Diluar lahan yang sudah diberikan kepada perusahaan dan lahan koperasi desa, sudah 64% lahan desa Payarumbai dimiliki oleh orang luar. Sekitar ±1.000 ha lahan desa sudah dimiliki oleh pendatang.

Saat ini mata pencaharian utama masyarakat desa Payarumbai sudah beralih dari nelayan, penebang kayu dan petani menjadi pekerja kebun (baca: buruh), nelayan (meski hasil yang didapat tidak seberapa) dan penebang kayu. Mereka yang bekerja sebagai nelayan, harus pergi ke muara sungai untuk mencari ikan selama ±3 hari untuk mendapatkan ikan yang jika diuangkan hanya cukup untuk makan satu hari untuk satu keluarga.

Sebagai buruh lepas upah yang didapat beragam, mulai dari Rp50.000 – Rp60.000 per hari tapi ini pun tidaklah terlalu mudah untuk didapatkan. Seorang warga yang memiliki status ekonomi lumayan bercerita bahwa, setiap pagi selalu saja ada orang kampung yang datang padanya meminta pekerjaan. Kadang kalau memang lagi perlu ia akan mempekerjakan mereka tapi kalau tidak, maka mereka harus mencari ke tempat lain.

Menurut mereka yang berhenti, upah yang sekarang tidaklah cukup untuk makan satu hari untuk satu keluarga. Untuk menutupi kebutuhan hidup mereka harus berhutang ke pemilik warung. Sistem kekerabatan yang kental membuat sebagian mereka bisa bertahan hidup karena boleh berhutang di warung milik kerabatnya. Efek negatif dari konsumtifisme ini adalah terjadinya politik warung. Maksudnya adalah hak politik warga yang berhutang dapat dikendalikan adalah pemilik warung.

Bagi masyarakat lokal, pekebunan kelapa sawit bukanlah jawaban atas kemiskinan. Masyarakat miskin semakin terjebak dalam skema perkebunan. Mereka tidak bisa menanam padi karena lahan yang sering terkena banjir dimusim hujan. Sementara, tidak pernah ada pembinaan yang serius dari perusahaan kepada mereka tentang bagaimana berkebun kelapa sawit yang baik. Ada anggapan masyarakat lokal bahwa warga transmigran yang tinggal di desa sebelah mereka lebih beruntung karena bisa mendapatkan pembinaan dan pelatihan pemakaian bahan kimia di perkebunan

Meskipun pandangan ini mungkin benar di beberapa daerah transmigrasi, banyak dokumentasi tentang program transmigrasi yang gencar dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Suharto justru mengakibatkan para transmigran menjadi lebih miskin. Hal ini juga menyebabkan peniadaan sistematis hak atas tanah dan sumber daya serta hilangnya mata pencaharian

bagi masyarakat lokal dan perusakan hutan di wilayah sasaran program.[104] Program ini berlanjut hingga hari ini di mana lahan banyak tetapi tenaga kerja untuk usaha komersial langka, meskipun dalam bentuk skala-kecil dan dalam bentuk yang berbeda.

Belum tentu masyarakat transmigran mempunyai kehidupan yang lebih baik, namun pandangan seolah-seolah mereka lebih kaya berpotensi menciptakan konflik antar -masyarakat di daerah tersebut.

Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa akar kemiskinan di Paya Rumbai terletak pada hilangnya sumber daya alam dan mata pencaharian ke tangan pengembang kelapa sawit yang berkuasa, dan memburuknya hubungan kekuasaan antara penduduk desa asli, perusahaan dan para pendatang yang membeli tanah.

Kerugian ini harus betul-betul diakui dan diatasi, tetapi kebutuhan masyarakat desa yang lebih mendesak juga perlu dipenuhi, yaitu bantuan dan pelatihan guna memungkinkan mereka untuk memperbaiki kehidupan mereka dalam situasi sekarang.

Anak-anak bermain kelereng dihalaman rumah

Photo: © DTE

104 http://dte.gn.apc.org/ctrans.htm

Photo: © DTE

Lampiran 1

Perkembangan Pembangunan BBN[105]

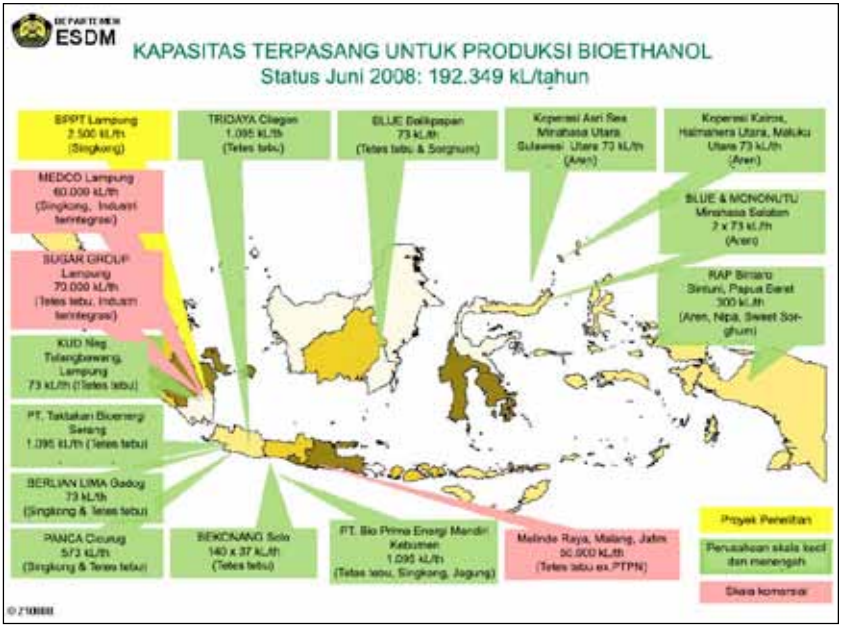

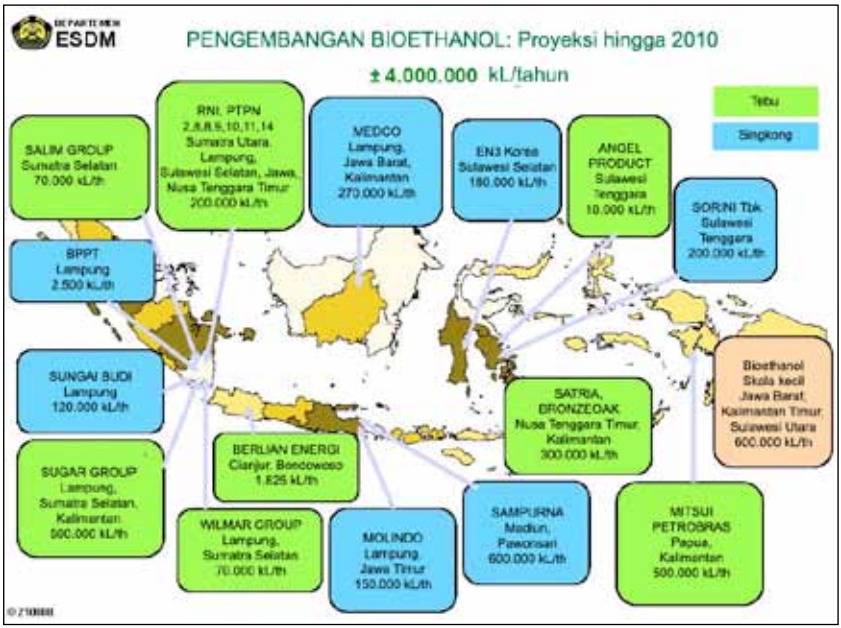

105 Kementrian ESDM. *Biofuel Development in Indonesia.* http://www.biofuels.apec.org/pdfs/apec_200810_wiryawan.pdf

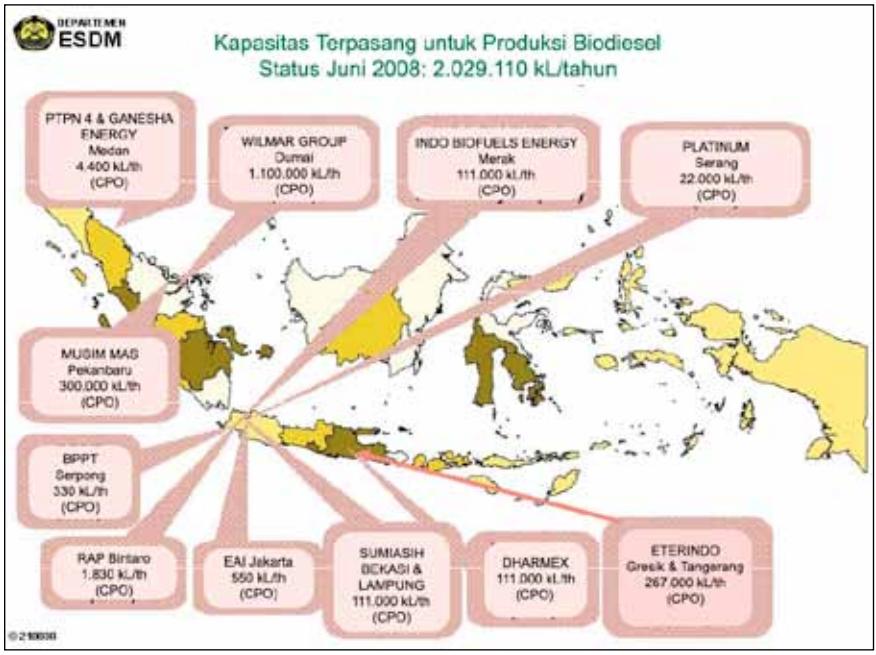
DEPARTEMEN ESDM
Kapasitas Terpasang untuk Produksi Biodiesel
Status Juni 2008: 2.029.110 kL/tahun
PTPN 4 & GANESHA ENERGY Medan 4.400 kL/th (CPO)
WILMAR GROUP Dumai 1.100.000 kL/th (CPO)
INDO BIOFUELS ENERGY Merak 111.000 kL/th (CPO)
PLATINUM Serang 22.000 kL/th (CPO)
MUSIM MAS Pekanbaru 300.000 kL/th (CPO)
BPPT Serpong 330 kL/th (CPO)
RAP Bintaro 1.830 kL/th (CPO)
EAI Jakarta 550 kL/th (CPO)
SUMIASIH BEKASI & LAMPUNG 111.000 kL/th (CPO)
DHARMEX 111.000 kL/th (CPO)
ETERINDO Gresik & Tangarang 267.000 kL/th (CPO)

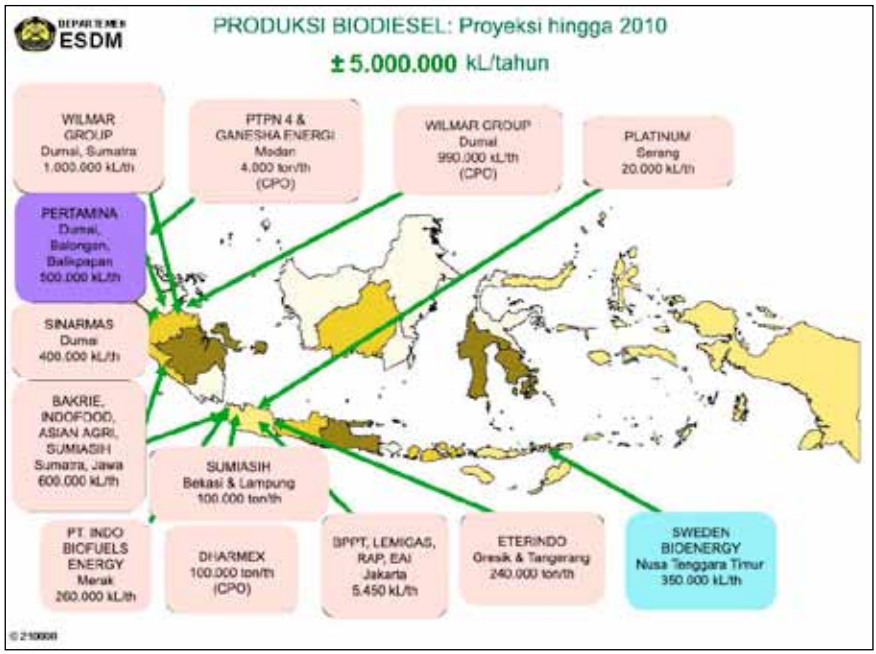
DEPARTEMEN ESDM
PRODUKSI BIODIESEL: Proyeksi hingga 2010
± 5.000.000 kL/tahun
WILMAR GROUP Dumai, Sumatra 1.000.000 kL/th
PTPN 4 & GANESHA ENERGI Medan 4.000 ton/th (CPO)
WILMAR GROUP Dumai 990.000 kL/th (CPO)
PLATINUM Serang 20.000 kL/th
PERTAMINA Dumai, Balongan, Balikpapan 500.000 kL/th
SINARMAS Dumai 400.000 kL/th
BAKRIE, INDOFOOD, ASIAN AGRI, SUMIASIH Sumatra, Jawa 600.000 kL/th
SUMIASIH Bekasi & Lampung 100.000 ton/th
PT. INDO BIOFUELS ENERGY Merak 260.000 kL/th
DHARMEX 100.000 ton/th (CPO)
BPPT, LEMIGAS, RAP, EAI Jakarta 5.450 kL/th
ETERINDO Gresik & Tangerang 240.000 ton/th
SWEDEN BIOENERGY Nusa Tenggara Timur 350.000 kL/th

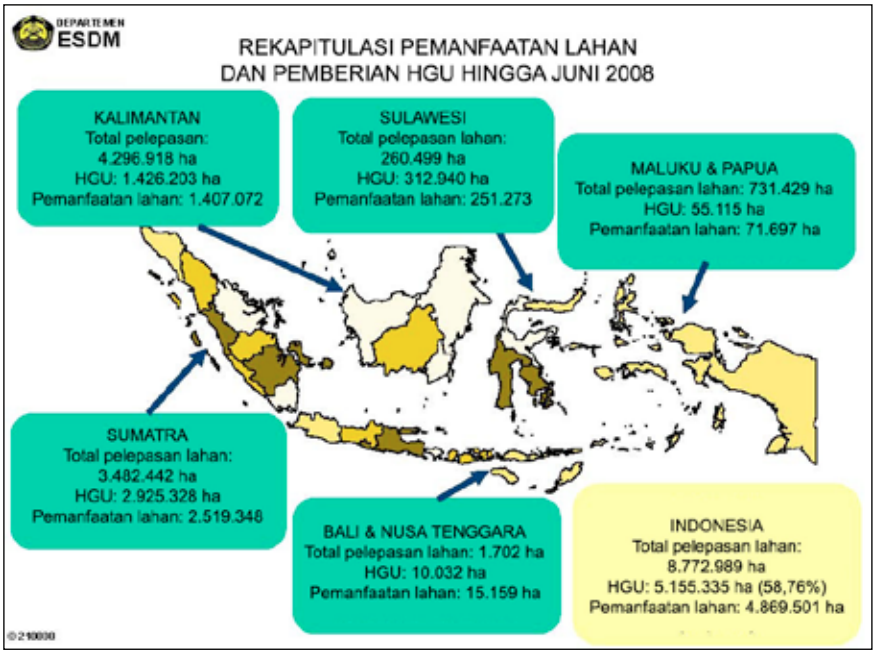
DEPARTEMEN ESDM
REKAPITULASI PEMANFAATAN LAHAN
DAN PEMBERIAN HGU HINGGA JUNI 2008
KALIMANTAN
Total pelepasan:
4.296.918 ha
HGU: 1.426.203 ha
Pemanfaatan lahan: 1.407.072
SULAWESI
Total pelepasan lahan:
260.499 ha
HGU: 312.940 ha
Pemanfaatan lahan: 251.273
MALUKU & PAPUA
Total pelepasan lahan: 731.429 ha
HGU: 55.115 ha
Pemanfaatan lahan: 71.697 ha
SUMATRA
Total pelepasan lahan:
3.482.442 ha
HGU: 2.925.328 ha
Pemanfaatan lahan: 2.519.348
BALI & NUSA TENGGARA
Total pelepasan lahan: 1.702 ha
HGU: 10.032 ha
Pemanfaatan lahan: 15.159 ha
INDONESIA
Total pelepasan lahan:
8.772.989 ha
HGU: 5.155.335 ha (58,76%)
Pemanfaatan lahan: 4.869.501 ha

DEPARTEMEN ESDM
LAND AND CLIMATE COMPATIBILITY MAP FOR PALM
(3 million hectares)

Lampiran 2

BBN[106]

STRATEGI PENYEDIAAN BAHAN BAKAR NABATI

STRATEGI TO SUPPLY BIO-FUEL: OIL-PALM, JATROPHA, SUGAR CANE, CASSAVA

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 - 2015

Bio-Energy for Rural Communities (Bio-Briquette & Bio-Kerosene)

Planning & preparation

Total Planted Field: 2,85 million hectares

Total Planted Field: 5,25 million hectares

Gov of Indonesia (GoI) Bio-Fuel Incentives :
Research: GoI develops Superior Varieties of Jatropha Curca - Cassava - Sugarcane
Infrastructure: GoI developes insfrastructure support US$ 1.1 bio/year
Investment: Tax Allowance etc; Seed Capital for Biofuel Fund US$ 220 mil
Incentivies to Farmers: GoI subsidies interest rate US$ 110 mil/year

RENCANA STRATEGIS SAMPAI DENGAN 2015

STRATEGIC PLAN FOR:
BIO-DIESEL (B), BIO-OIL (O), BIO-KEROSEN (O)

1. Policies on Bio-Diesel & Bio-Oil (Transportation, Bio-Kerosen & Power Generation)

2006	2007-2008	2009-2010	2011 - 2015
Specification & Test of: B5 Bio-Diesel 05 Bio-Oil Trasp. 010 Bio-Kerosen 050 Bio-Oil PLN	Pertamina+PLN Mandate: B10 in Big Cities 05 Transport. (5% Vol) 010 Bio-Kerosen (5% Vol) 050 for PLN (20% Vol)	Pertamina+PLN Mandate: B10 in Big Cities 05 Transport. (5% Vol) 010 Bio-K Whole Country 050 for PLN (50% Vol)	Pertamina+PLN Mandate: B10 in Big Cities 05 Transport. (5% Vol) 010 Bio-K Whole Country 050 for PLN (20% Vol)

2. Action Plan for Bio-Diesel & Bio-Oil

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2013	2015
Existing Palm Oil								
1. Area, Mil Ha	55	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
2. Export Volume, Mil KL/year	11	11	11	11	11	11	11	11
IGE-AP Palm Oil:								
1. Area, Mil Ha	0.1	0.3	0.6	1	1.5	2	3	4
2. Volume, Mil KL/year	0	0	0	0.4	1.3	2.6	6.7	17.7
IGE-AP Jatropha Curcas:								
1. Area, Mil Ha	0.004	0.06	0.3	0.9	1.5	2.0	3	3.0
2. Volume, Mil KL/year	0.0006	0.038	0.198	0.598	1.0	3.0	4.5	4.5
Total Volume, Mil KL/year	11.0006	11.038	11.198	11.998	13.298	16.6	22.2	33.2
Vol Solar+Kerosen, Mil KL/year	31.83	29.74	30.65	31.59	32.57	32.57	32.57	32.57
D-Fuel Substitution, Mil KL/year	0	1.98	6.73	6.89	7.06	7.06	7.06	7.06
Surplus Bio-Fuel, Mil KL/year	11.006	9.058	4.468	5.108	6.238	9.54	15.14	26.14

106 http://www.indobiofuel.com/Timnas%20BBM%204.php

Proyeksi pengembangan BB sampai 2010

Parameter	Unit	Sawit	Jarak Pagar	Tebu	Singkong	Total
Lahan	hektar	1.500.000	1.500.000	750.000	1.500.000	5.250.000
Produksi	ton biji, batang, umbi	30.000.000	7.500.000	60.000.000	30.000.000	127.500.000
Bio-ethanol atau Bio-diesel	ton minyak	6.000.000	2.250.000	3.750.000	4.615.385	16.615.385
Industri	unit	167	22.727	125	288	23.307
Tenaga kerja langsung	orang	750.000	500.000	1.500.000	750.000	3.500.000
Tenaga kerja tidak langsung	orang	1.167	68.182	6.250	11.538	87.137

Sumber: http://www.indobiofuel.com/Timnas%20BBM%204.php

Proyeksi Pengembangan Bahan Bakar Nabati sampai dengan 2015

Parameter	Unit	Sawit	Jarak Pagar	Tebu	Singkong	Total
Lahan	hektar	4.000.000	3.000.000	1.750.000	1.500.000	10.250.000
Produksi	ton biji, batang, umbi	80.000.000	15.000.000	140.000.000	30.000.000	265.000.000
Bio-ethanol atau Bio-diesel	ton minyak	16.000.000	4.500.000	8.750.000	5.100.000	34.350.000
Industri	unit	444	45.455	292	319	46.510
Tenaga kerja langsung	orang	2.000.000	1.000.000	3.500.000	750.000	7.250.000
Tenaga kerja tidak langsung	orang	3.111	136.364	14.583	12.750	166.808

Sumber: http://www.indobiofuel.com/Timnas%20BBM%205.php

ROADMAP PEMANFAATAN BIOFUEL NASIONAL

Tahun	2005-2010	2011-2015	2016-2025
Biodiesel	Pemanfaatan Biodiesel Sebesar Konsumsi Solar 10% 2.41 juta kL	Pemanfaatan Biodiesel Sebesar 15% Konsumsi Solar 4.52 juta kL	Pemanfaatan Biodiesel Sebesar 20% Konsumsi Solar 10.22 juta kL
Bioetanol	Pemanfaatan Bioetanol 5% Konsumsi Premium 1.48 juta kL	Pemanfaatan Bioetanol 10% Konsumsi Premium 2.78 juta kL	Pemanfaatan Bioetanol 15% Konsumsi Premium 6.28 juta kL
Biooil - Biokerosin	Pemanfaatan Biokerosin 1 juta kL	Pemanfaatan Biokerosin 1.8 juta kL	Pemanfaatan Biokerosin 4.07 juta kl
- PPO untuk Pembangkit Listrik	Pemanfaatan PPO 0.4 juta kL	Pemanfaatan PPO 0.74 juta kL	Pemanfaatan PPO 1.69 juta kl
Biofuel	Pemanfaatan Biofuel Sebesar 2% energi mix 5.29 juta kL	Pemanfaatan Biofuel Sebesar 3% energi mix 9.84 juta kL	Pemanfaatan Biofuel Sebesar 5% energi mix 22.26 juta kL

Sumber: http://www.indobiofuel.com/Timnas%20BBM%208.php

Kembali ke rumah setelah menyelesaikan pekerjaan diperkebunan kelapa sawit

Photo: © DTE

Catatan istilah

- Area penggunaan lain(APL) adalah areal di luar bidang kehutanan
- Biomassa adalah bahan organik yang terbuat dari tumbuhan dan hewan. Biomassa mengandung energi tersimpan yang berasal dari matahari. Tanaman menyerap energi matahari dalam proses yang disebut fotosintesis.
- Bioliquids adalah salah satu jenis dari energi alternatif yang berbentuk cair.
- Biogas atau sering pula disebut gas bio dihasilkan dari proses penguraian secara biologis bahan-bahan organik, seperti kotoran hewan, kotoran manusia, atau sampah, di dalam tempat tertutup atau anaerob (tanpa oksigen dari udara).
- BBN: Bahan bakar nabati atau biofuel atau agrofuel diperoleh dari tanaman-tanaman yang menghasilkan minyak atau alkohol.
- Dumping: sistem penjualan barang di pasaran luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah sekali (dengan tujuan agar harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan sehingga akhirnya dapat menguasai pasaran luar negeri dan dapat menguasai harga kembali)
- Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun bagi perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan, dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun. HGU merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri.
- Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) adalah investasi dan atau kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank kepada Koperasi Primer untuk diteruskan kepada anggota-anggotanya guna membiayai usaha anggota yang produktif.
- Oplosan adalah hasil mengoplos; campuran; larutan.
- Parkinson adalah penyakit degenerasi yang menyerang otak karena kurangnya dopamine dalam otak. Penyakit ini sulit dicegah dan disembuhkan. Ciri-cirinya, pertama, gemetar tak terkontrol di tangan atau kaki saat istirahat. Kedua, kaku anggota gerak. Ketiga, gerakan melambat, gangguan berjalan, dan gangguan keseimbangan
- Pendapatan domestik bruto (PDB): merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun kecuali surplus ekspor.
- Petani plasma atau petani peserta kebun plasma adalah petani yang memiliki lahan dan terdaftar sebagai anggota koperasi serta lahannya ditanami tanaman perkebunan yang dibangun oleh Perusahaan Inti dengan menggunakan KKPA.
- Prinsip Padiatapa atau pengambilan keputusan bebas didahulukan dan tanpa paksaan merupakan terjemahan dari prinsip free prior and informed consent (FPIC). Pengertian dari FPIC adalah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (Informed) sebelum (Prior) sebuah program atau proyek investasi dilaksanakan dalam wilayah mereka dan berdasarkan informasi tersebut,

mereka secara bebas tanpa tekanan (Free) menyatakan setuju (Consent) atau menolak.

- Belum ada terjemahan baku untuk prinsip ini. Beberapa variasi penerjemahan oleh aktivis lingkungan adalah prinsip keputusan bebas didahulukan dan diinformasikan (KBDD) dan prinsip adil bersepakat.
- Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang menyediakan unsur hara bagi kebutuhan tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung. Pupuk menurut macamnya dibagi 2 yaitu pupuk organik dan anorganik/kimia. Pupuk anorganik/kimia terbentuk dari hasil proses rekayasa industri secara kimia, fisik / biologis. Jenis pupuk ini banyak digunakan diperkebunan kelapa sawit. Asosiasi Pupuk Internasional merekomendasikan agar petani menggunakan sarung tangan karet dan penutup hidung saat melakukan pemupukan. Lihat: http://www.fertilizer.org/ifa/Home-Page/SUSTAINABILITY/Human-health/Fertilizer-products.html.

Photo: © DTE

Atas

Kelapa sawit

Kanan

Buah sawit

Photo: © DTE

"Akan sia-sia kita membangun, kalau kita tidak mampu mengangkat rakyat kita dari lembah kemiskinan dan keterbelakangan".

(*Susilo Bambang Yudhoyono, Pidato Kenegaraan Presiden RI, 2006*)

D!T!E

Down to Earth

Kampanye Internasional untuk Lingkungan Hidup yang Berkeadilan di Indonesia